

**MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS**

**(Studi *Participatory Action Research* dalam Penyelesaian Persoalan Sampah
pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06 Kelurahan Sunter
Agung, Jakarta Utara)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama
Komunikasi Massa

Oleh:

ERIN SULASTIKA

145120201111098



JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis

Komunitas (Studi *Participatory Action Research* dalam Penyelesaian Persoalan

Sampah pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06

Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Erin Sulastika

NIM. 145120201111098

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 27 Juli 2018

Pembimbing I

Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom

NIK. 2011068408112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si.AKd

NIK. 19690814 19940210 01

LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 27 Juli 2018 dengan daftar penguji sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN PENGUJI
1	Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom	Ketua Majelis Sidang
2	Yun Fitrahyati Laturrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom	Anggota Sidang Majelis Penguji 1
3	Isma Adila, S.I.Kom., M.A	Anggota Sidang Majelis Penguji 2



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erin Sulastika
NIM : 145120201111098
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Peminatan : Komunikasi Massa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

“MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS (Studi Participatory Action Research dalam Penyelesaian Persoalan Sampah pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara)”

Adalah benar merupakan karya sendiri. Hal yang bukan karya saya, diberi tanda dan citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Malang, Juli 2018



Erin Sulastika
Erin Sulastika

NIM: 145120201111098

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya skripsi berjudul **“Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Participatory Action Research dalam Penyelesaian Persoalan Sampah pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06 Sunter Agung, Jakarta Utara)”** sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Joko Suseno dan Ibu Dwi Kartika Ernawati yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, motivasi, serta pengarahan kepada penulis.
2. Kedua saudara penulis, yaitu Nanda Dika Arseno dan Nabila Alit Ramadhina yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Ibu Sri Handayani., S.Pd., M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yun Fitrahyati Laturrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan banyak masukan pada skripsi ini.

5. Bapak Dr. Antoni selaku ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.
6. Seluruh dosen serta karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi.
7. Kepada para sahabat SMP penulis yaitu Dian Annisa PF dan Ajeng Poernomo yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat setia selama di Malang, Kabiir Hafiz dan Qinanta Putra yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada para teman seperantauan Girlsawat, Cut Ramona, Gita Astika, Ditha Fathiana, Nadia Rizky, Lady Suci, Nadya AM, Nazula, Mariam Aprilia, Devy Noach, Hanna Deslian, Azkiyah Mualimah, Nia Happy, Gladiola yang selalu ada dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Anak Sholeh, Takara Tantarto, Dheya Nazura, Safira Arifinandia, Mirza Fitriana, Fadhila Qorira, dan Dara Fiereiza yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman Earth Hour Malang, Yola Velinda, Faried Fadilah, Arief Wicaksono, Onil Laseta, Claudia, Frido Wahyu, Galih Darmawan, Taufan Ady Cahyo dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengetahuan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Kepada teman-teman pengisi waktu luang, Jibran Averusy, Singgih PN, Cita Baskara, Cipto Adi dan teman-teman lainnya yang selalu menemani dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
13. Kepada Billyandri Herfiantara yang telah menjadi partner Peneliti dalam melakukan penelitian ini.
14. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawujaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan laporan ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila adanya batasan dan kekurangan. Tetapi, penulis dengan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kajian Public Relations. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya.

Malang, 12 Juli 2018

Erin Sulastika

ABSTRAK

Erin Sulastika (2018). Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Participatory Action Research dalam Penyelesaian Persoalan Sampah pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06 Sunter Agung, Jakarta Utara). Di bawah bimbingan dari Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom

Permasalahan yang timbul tidak terlepas dari dampak pembangunan, dengan adanya peningkatan pembangunan perumahan masyarakat membuat sampah rumah tangga yang dihasilkan semakin banyak. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya penanganan yang tepat dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan, sangat dibutuhkannya komunikasi lingkungan dalam penerapan perencanaan agar penanganan yang tepat dan efisien dapat tercapai. Mengamati isu lingkungan mengenai sampah, hal ini dapat dikaitkan dengan kajian komunikasi lingkungan yang merupakan cabang dari komunikasi pembangunan yang memiliki sifat untuk memunculkan kesadaran masyarakat dalam berperan aktif pada pengelolaan lingkungan.

Tujuan penelitian yaitu untuk membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program pengelolaan sampah melalui komunitas di lingkungan RW 03 dan RW 06 Sunter Agung. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan grounded research, dikarenakan penelitian ini tidak bergantung pada asumsi apapun menganalisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti dalam upaya membangun partisipasi dan menyadarkan masyarakat mengenai persoalan sampah telah melakukan berbagai kegiatan mulai dari Focus Group Discussion (FGD), dialog, serta edukasi dan daur ulang sampah rumah tangga. Pada partisipasi yang telah dilakukan masyarakat masuk pada jenis partisipasi murni, karena masyarakat terlibat penuh dari awal perencanaan hingga pada tahap evaluasi program. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, program yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan edukasi dan daur ulang pengolahan sampah membuahkan dampak positif bagi masyarakat, hal tersebut dinyatakan dari hasil wawancara warga yang mengapresiasi program yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci: Komunikasi Lingkungan, *Participatory Action Research* (PAR), Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas

ABSTRACT

Erin Sulastika (2018). Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya. Building Society Participation in Community Base on Waste Management Program (Studies Participatory Action Research in Solving Problems in the Environment Waste & Community RW 03 and RW 06 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara). Supervised by Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom

Problems arising from the impact of development is to increase the public housing development have an impact on household waste produced each. Therefore it is the need of proper and efficient handling. To tackle the problems of development, the very need of the communication environment in the implementation of planning so that the proper handling and efficiency can be achieved. Viewing environmental issues regarding litter, this can be attributed to environmental communication studies part of the communication development that has properties to raise public awareness in an active role in environmental management

The purpose of the research is to build public awareness and participation in waste management program through the environmental community in RW 03 and RW 06 Sunter Agung. Researchers using this type of qualitative research with grounded research, because research does not depend on any assumptions analyzed the data using model data analysis Miles and Huberman.

The results showed that researchers in an effort to build participation and demonstrated to the public about the issue of garbage has been conducting a variety of activities ranging from the Focus Group Discussion (FGD), dialogue, as well as education and waste recycling home ladder. On the participation of the community has done the kind of pure, because community participation involved in full from the beginning planning stages through to the evaluation of the program. Based on community needs, programs that have been carried out by researchers in educational activities and recycling garbage processing resulted in a positive impact for the community, it is revealed through the appreciation of the citizens against the programs that have been implemented.

Keywords: *Environmental Communication, Participatory Action Research (PAR), Community Empowerment, Community.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Akademis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Komunikasi Pembangunan (Lingkungan) dan Perubahan Sosial	16
2.2 Pengembangan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan	23
2.3 Komunikasi Partisipatoris yang Berhubungan dengan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan	26
2.4 Posisi Partisipasi dalam Komunikasi Pembangunan Modernisme	34
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Tahapan Proses Penelitian Tindakan Partisipatoris	47
3.3 Penentuan Partisipan Penelitian	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Analisis Data	52
3.6 <i>Goodness Criteria</i>	54
3.7 Etika Penelitian	55
BAB IV HASIL	56
4.1 Profil Kelurahan Sunter Agung	58

4.2	Sunter dan Persoalan Sampah	63
4.3	Gambaran Umum Persoalan Sampah Sunter	65
4.3.1	Perbedaan Pandangan antara Pihak Pemerintah & Masyarakat tentang Permasalahan Sampah.....	69
4.3.2	Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Terkait Penyelesaian Masalah Sampah.....	72
4.3.3	Inisiasi Pembentukan Komunitas Peduli Sampah.....	78
4.3.4	Rencana Program oleh Komunitas.....	79
4.3.5	Pelaksanaan Program	81
4.4	Penerimaan Masyarakat terhadap Tindakan	84
BAB V PEMBAHASAN.....		89
5.1	Memposisikan Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Lingkungan): Perspektif Partisipatoris.....	89
5.2	Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Sampah Melalui Komunikasi Partisipatoris.....	93
5.3	Batasan Penelitian pada <i>Participatory Action Research</i> (PAR).....	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		104
6.1	Kesimpulan	104
6.2	Saran.....	105
6.2.1	Saran Teoretis.....	105
6.2.2	Saran Praktis.....	106
6.3	Limitasi Penelitian	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN.....		114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 3.1 Model Spiral Penelitian Tindakan Partisipatori.....	48
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman.....	53
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Sunter Agung.....	58
Gambar 4.2 Pemukiman warga wilayah RW 03 Sunter Agung.....	61
Gambar 4.3 Kali Sunter berdekatan dengan wilayah RW 03 Sunter Agung.....	61
Gambar 4.4 Pemukiman wilayah RW 06 Sunter Agung.....	62
Gambar 4.5 Pembedaan tempat sampah di wilayah RW 06 Sunter Agung.....	62
Gambar 4.6 Kondisi sampah di TPST Sunter Agung.....	66
Gambar 4.7 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin RW 06 Sunter Agung.....	70
Gambar 4.8 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin PKK RW 03 Sunter Agung.....	72
Gambar 4.9 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin RW 03 Sunter Agung.....	74
Gambar 4.10 Berbagi Pengalaman Mengenai Pengolahan Sampah.....	82
Gambar 4.11 Kegiatan Daur Ulang Koran Bekas.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	60
Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, permasalahan sampah merupakan salah satu poin penting bagi tiap negara, terutama Indonesia (Sudrajat, 2006). Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup tahun 2014, permasalahan sampah disebabkan juga oleh daya angkut sampah yang kurang optimal sehingga terjadi penumpukan yang membuat sampah menjadi terabaikan dan membentuk lingkungan yang tidak nyaman bagi masyarakat sekitar, bahkan total sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton/tahun, serta diperkirakan pada tahun 2025, produksi sampah di Indonesia mencapai 130.000 ton/hari.

Faktor utama dari permasalahan sampah di Indonesia juga didasari pada kota-kota besar yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, antara lain Medan, Palembang, DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Makasar (Kementrian Negara Lingkungan Hidup/KNLH, 2008). Data salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan sampah adalah DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 10.177.924 jiwa (BPS Jakarta In Figure, 2016). Sebagai Ibu Kota Negara seharusnya kota ini bebas dari sampah, namun permasalahan sampah masih belum bisa diatasi, karena sebanyak 6.000 sampai 7.000 ton sampah dihasilkan Kota DKI Jakarta setiap harinya. Jika diuraikan, akan menghasilkan sampah

organik 53,7501% dan sampah non organik 46,25% (Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, 2011).

Permasalahan yang timbul tidak terlepas dari dampak pembangunan, dengan adanya peningkatan pembangunan perumahan masyarakat membuat sampah rumah tangga yang dihasilkan semakin banyak. Oleh karena itu sangat dibutuhkan penangan yang tepat dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan, sangat dibutuhkan komunikasi lingkungan dalam penerapan perencanaan agar penanganan yang tepat dan efisien dapat tercapai. Mengamati isu lingkungan mengenai sampah, hal ini dapat dikaitkan dengan kajian komunikasi lingkungan yang merupakan cabang dari komunikasi pembangunan yang memiliki sifat untuk memunculkan kesadaran masyarakat dalam berperan aktif pada pengelolaan lingkungan (Herutomo, 2013).

Komunikasi lingkungan awalnya diperkenalkan melalui konferensi Stockholm pada tahun 1972, dalam konferensi tersebut membahas mengenai perkembangan pembangunan pada lingkup lingkungan dan mengupayakan adanya dorongan dari negara lain untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan bekerjasama oleh pihak tertentu, terutama pada tingkat Internasional (Kamaruddin, 2014). Menurut Alwi Dahlan (1986) kajian komunikasi pembangunan yang berkaitan mengenai isu lingkungan, sudah mulai muncul pada tahun 80an di Indonesia. Dengan munculnya komunikasi lingkungan saat itu mengakibatkan adanya dilema antara komunikasi lingkungan dan komunikasi pembangunan dikarenakan sifat kajian isu lingkungan lebih mengerucut pada permasalahan yang ada. Dahlan juga menambahkan bahwa kehadiran kajian komunikasi lingkungan

berpengaruh bagi dampak permasalahan lingkungan alam seperti bencana dan lingkungan yang dibuat oleh manusia seperti masalah kesehatan, masalah pengelolaan lingkungan, berupa sampah dan limbah. Dengan adanya komunikasi lingkungan, permasalahan sampah yang terjadi dapat diupayakan dengan suatu tindak komunikasi lingkungan yang memiliki wewenang dan kebijakan melalui Pemerintah dalam membuat suatu program yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan sampah (Dahlan, 1986).

Penjelasan mengenai perkembangan komunikasi lingkungan menurut Dahlan (1986) sangat berpengaruh besar bagi berlangsungnya perkembangan isu lingkungan yang ada saat ini, akan tetapi pelaksanaan mengenai komunikasi lingkungan masih sulit dilakukan karena isu lingkungan kini masih kurang dikenal dibandingkan isu lainnya. Dilansir dari portal media online kompas.com, padahal masalah lingkungan kini menjadi suatu permasalahan yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, hingga saat ini masih diperlukannya fungsi komunikasi yang cukup efektif agar pesan yang terkandung dalam program pengelolaan sampah dapat membangkitkan kesadaran antara Pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan fungsi utama dari komunikasi lingkungan, yaitu Fungsi strategis untuk menggerakkan kesadaran Pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, serta fungsi teknisnya yang menginformasikan kepada masyarakat terkait isu lingkungan yang berkembang saat ini melalui berbagai media (Ariestya, 2017).

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dilihat oleh peneliti, jika tidak ada upaya dalam mengatasi peningkatan pembangunan tersebut dengan

memanfaatkan berbagai sudut pandang mulai dari komunikasi pembangunan sendiri sampai komunikasi lingkungan, dapat menimbulkan permasalahan baru, terutama di daerah perkotaan. Kardono (2007) juga mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.

Berangkat dari pernyataan tersebut, secara garis besar sudah menggambarkan bagaimana permasalahan sampah serta pengelolaannya menjadi hal yang patut diperhitungkan. Bertolak dari hal tersebut, perlu mempertimbangkan prioritas aspek penting dalam pengelolaan sampah. Menurut Amurwaraharja (2003), dalam rangka menentukan alternatif teknologi pengolahan sampah ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Kriteria dari aspek sosial diantaranya penyerapan tenaga kerja, potensi konflik dengan masyarakat rendah, menumbuhkan lapangan usaha, menumbuhkan sektor formal dan informal, penguatan peran serta masyarakat. Aspek ekonomi dapat dijabarkan menjadi tiga kriteria, yaitu investasi rendah, biaya operasional rendah, menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Adapun kriteria dari aspek lingkungan dapat dijabarkan menjadi kriteria-kriteria yaitu meminimalisir pencemaran air, pencemaran udara dan bau, pencemaran tanah, habitat bibit penyakit, serta meminimalisir penurunan estetika/keindahan lingkungan. Kemudian, permasalahan sampah yang hingga saat ini tidak kunjung selesai, sehingga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu permasalahan banjir,

yang sampai saat ini masih dialami oleh warga Jakarta, hal tersebut dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Sandiaga Uno yang dikutip dari portal berita online okezone.com (2017). Selain itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan RI, dr. Imran Agus dikutip dari linisehat.com (2018) mengatakan bahwa dampak dari limbah sampah juga dapat berpengaruh bagi kesehatan seperti, TBC dan demam berdarah.

Dengan berbagai macam permasalahan yang timbul di masyarakat, bukan berarti pemerintah sebagai pemangku kepentingan, tidak memiliki upaya terkait pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tugas dari Pemerintah adalah memberikan fasilitas, mengembangkan, dan melaksanakan upaya mengurangi dan menangani persoalan sampah, mengeksplorasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, dan mengembangkan teknologi dalam penanganan persoalan sampah. Pemerintah dalam melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah melakukan dengan dua cara, yaitu mengurangi sampah dari sumbernya dan menangani sampah yang sudah ada (Laporan Kinerja KNLH, 2017). Dampak-dampak tersebut menjadi bukti bahwa permasalahan sampah itu bukan terjadi karena permasalahan pengelolaan, melainkan adanya permasalahan sosial yang timbul, hal tersebutlah yang jarang disebutkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Rijadi (2010) menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa permasalahan sampah muncul karena peningkatan pertumbuhan masyarakat dan angka konsumerisme yang tinggi. Sebelumnya dari permasalahan tersebut, telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat, akan tetapi tidak berjalan. Dengan

demikian, hal tersebut yang membuat Rijadi tergerak dalam melakukan penelitian tindakan untuk kesejahteraan sosial.

Dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat (Chaerul et al, 2007). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sosial dan pengelolaan, Pemerintah yang telah melakukan upaya-upaya, yaitu dengan pengadaan bank sampah di tiap daerah, pemberian penghargaan Adipura bagi kota yang ramah lingkungan dan bersih dari sampah pada tahun 2015, dan program kantong plastik berbayar pada tahun 2016 (KNLH, 2017). Selain itu, menurut Dinas Lingkungan Hidup (2017), selama ini Pemerintah telah melakukan upaya dalam pengadaan alat kebersihan, mengadakan kegiatan yang bersifat pemeliharaan, serta dengan merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota yang memanfaatkan sampah untuk menjadi energi alternatif yang disebut dengan *Waste to Energy* (WTE) atau yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang dikenal sebagai *Intermediate Treatment Facility* (ITF) (Dinas Lingkungan Hidup, 2017). Padahal selain persoalan teknologi, permasalahan sampah juga berkaitan dengan persoalan kultural yang menjadikan kebiasaan pada masyarakat, hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sudrajat (2006) yang menjelaskan bahwa, permasalahan sampah merupakan masalah yang sangat krusial dan menjadi masalah kultural di Indonesia, dikarenakan sampah menimbulkan dampak bagi kehidupan di masyarakat.

Peneliti dalam mempertimbangkan lokasi penelitian melihat dari dampak yang dihasilkan dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah Jakarta Utara pada proyek pembangunan pengelolaan sampah berbasis tenaga listrik (ITF) di Sunter Agung. Menurut data dari profil wilayah Sunter Agung pada tahun 2016, sampah yang diproduksi per harinya sekitar 49, 9 m³. Melalui data tersebut, tiap hari wilayah Sunter Agung menghasilkan sampah yang terbilang banyak, hingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya upaya untuk mengurangi sampah bagi tiap RW Sunter Agung. Permasalahan mengenai sampah di wilayah Sunter ini menarik peneliti untuk membahas lebih lanjut, karena Sunter dicap sebagai wilayah yang “akrab” dengan sampah. Hal ini yang menjadi gambaran bahwa permasalahan sampah, bukan karena masalah pengelolaan saja, melainkan juga karena adanya permasalahan sosial. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam, peneliti melakukan peninjauan langsung lokasi Sunter Agung dengan melakukan wawancara mendalam dan mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak yang terkait dari warga RW 03 dan RW 06 Sunter Agung untuk mengidentifikasi permasalahan sampah. Hal lain sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk melaksanakan kegiatan FGD di wilayah tersebut karena RW 03 dan RW 06 merupakan lokasi yang berdekatan dengan rencana pembangunan *Intermediated Treatment Facilities* (ITF). Melalui FGD dengan judul “BISA FASTER”, yang memiliki kepanjangan “Bincang Seputar Fasilitas Pengelolaan Sampah Sunter” yang bertempat di Sekretariat RW 06 Sunter Agung pada tanggal 21 Januari 2018, peneliti mengundang berbagai elemen pada FGD tersebut, yakni dari pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pihak Kelurahan Sunter Agung,

Pengurus RW setempat (RW 03 dan RW 06), perwakilan PKK dari masing-masing RW, perwakilan LMK, perwakilan FKDM dan perwakilan karang taruna dari masing-masing RW.

Melalui hasil FGD, permasalahan sampah yang muncul dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembedaan sampah dan menganggap bahwa sampah selama ini sudah ada yang mengaturnya. Kemudian hal tersebut yang menjadikan warga kurang peduli dengan sampah sekitar dan mengandalkan pemulung atau pihak pemerintah dalam mengambil tindakan persoalan sampah wilayah mereka.

“Pengolahan sampah dan perbedaan sampah organik dan non organik, selama ini kan masyarakat kita kan bukannya ngga mau tau atau masa bodo atau apa. Mereka sebetulnya butuh masukan gitu loh, sampah organik seperti apa sih, sampah non-organik seperti apa sih, kimia seperti apa sih. Terus kita pengen itu petugas sampah yang ada di kita minimal itu setiap hari bisa angkut. Karena yang kita tahu dari Bu Seklur sendiri sampah nggak bisa kebuang, itu pasti numpuk Pak”. (Aspirasi yang diutarakan oleh Pak Zainal warga RW 03 Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018)

Menurut Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung menyatakan bahwa permasalahan sampah yang muncul didominasi dari perilaku masyarakatnya sendiri, karena dengan diberikan berbagai fasilitas yang memadai, jika mind-set masyarakatnya masih belum sadar mengenai persoalan sampah, upaya tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, jika budaya atau cara pandang orang-orangnya tidak diubah, permasalahan sampah akan terus terjadi.

“Menurut saya Sunter Agung mau dikasih gerobak motor 10 sekalipun tidak akan mampu mengatasi sampah, ini pengalaman saya. Contohnya, Pak Ketua Kota Sehat juga ntar paham di jembatan ini ada sampah numpuk, mau diangkut saya nggak boleh Pak. Kenapa saya nggak boleh, karena memang batu. Orang-orang yang buang sampah ini batu. Orang tempat umum ditempatin sampah. Akhirnya begitu

numpuk hujan warga sekitar protes, yang protes kepada orang-orang yang buang sampah. Intinya sampah ini seperti apa pun akan dibicarakan tidak akan selesai kalau budaya bangsa ini tidak dirubah.” (Pernyataan dari Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018)

Berangkat dari pernyataan di atas, peneliti pada akhirnya melakukan penelitian *action research*, karena selama ini upaya yang telah dilakukan Pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan belum bersifat partisipatoris dan belum sampai pada menggugah kesadaran masyarakat. Kemudian dari asumsi yang dibangun dari hasil FGD, peneliti berinisiatif dalam melakukan *Participatory Action Research* (PAR), dikarenakan peneliti bukan hanya ingin memberikan solusi bagi masyarakat dalam hal pengentasan masalah sampah, tetapi juga peneliti juga nantinya akan membangun keterlibatan dari masyarakat mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, muncul motivasi yang kuat untuk serempak dalam mengatasi masalah lingkungan dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 1986). Dalam strategi ini, masyarakat tidak hanya berfokus pada banyak informasi yang diperoleh melalui program komunikasi pembangunan, akan tetapi juga pada peran keikutsertaan dalam berproses dari segi pengetahuan atau keterampilannya (Harun dan Ardianto, 2011). Menurut Wadworth (dalam Afandi, 2014) *Participatory Action Research* (PAR) meneliti mengenai permasalahan perubahan sosial di masyarakat yang mengganggu sistem kehidupan dan hingga dilakukannya perbaikan di dalamnya. PAR berupaya meningkatkan fungsi dari kelompok dalam melibatkannya hingga dapat

mempengaruhi seluruh kelompok yang lain (Betit, 2004). Stringer (dalam Betit, 2004) menjelaskan PAR termasuk pada penelitian pembangunan masyarakat, pemberdayaan melalui *stakeholder*, dan perubahan sosial. Dalam penelitian PAR seorang peneliti dan subjek penelitian hampir tidak dapat dibedakan, dengan begitu penciptaan lingkungan pada penelitian serta pemilihan partisipan sangat berpengaruh (Argyris & Schon, 1991, dalam Betit, 2004).

Selama ini telah ada beberapa program yang melibatkan masyarakat di wilayah Sunter Agung, namun program tersebut masih cenderung bukan pada partisipatoris, tapi hanya memobilisasi masyarakat untuk terlibat, misalkan dalam memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh Ibu-ibu koordinator RT di wilayah sekitar. Kemudian pada program tersebut akhirnya tidak berjalan sesuai harapan, karena masyarakat hanya sekedar di mobilisasi untuk melakukannya sehingga tidak ada kesadaran yang muncul dari masyarakat.

“Pengalaman saya jadi setiap RT itu saya punya dulu namanya koordinator RT tentang sampah kebanyakan Ibu-Ibu. Ibu-Ibu jumatik muter supaya memberitahu kepada warga masyarakat sejak dini tidak diperbolehkan buang sampah sembarangan sehingga semua warga di sekitar kita membuang sampahnya adalah pada tempat yang sudah disediakan.” (Pernyataan dari Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018)

Menurut Hamijoyo (2005), keikutserataan masyarakat tidak hanya dicapai dengan menggabungkan orang-orang dan membentuk kelompok, akan tetapi juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan

(*sense of ownership*) pada program yang nantinya akan dilaksanakan. Dengan demikian, harus dibangun partisipatoris murni dalam implementasi program yang akan dilaksanakan. Partisipatoris murni melihat pada kekompakan dari masyarakat dimulai saat pemikiran solusi permasalahan sampai dengan evaluasi program. Masyarakat ikut berperan aktif pada pelaksanaan program hingga ketahap lanjutan. Budaya seperti ini pantas untuk digunakan Indonesia karena dengan budaya yang gotong royong dapat mempererat tali persaudaraan sesama (Hamijoyo, 2005). Maka dengan begitu, dalam mengatasi persoalan sampah, masyarakat berkomitmen dengan apa yang telah mereka setuju bersama. Hal tersebutlah yang ingin dibangun oleh tim PAR (peneliti) dalam melakukan penelitian, yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yang fokus dalam membahas mengenai komunikasi pembangunan, khususnya pada studi partisipatif (*action research*). Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Rini Rinawati pada tahun 2005 berjudul 'Komunikasi dan Pembangunan Partisipatif'. Penelitian ini menjabarkan mengenai sejauh mana peranan komunikasi dalam kerangka pembangunan partisipatif pada studi kasus pembangunan desa yang belum mencerminkan aspirasi dari masyarakat, dengan membuat program *Community Action Plan (CAP)* dan peneliti sebagai fasilitator masyarakat sebagai pembangunan partisipatif, serta peneliti melakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam menganalisis kondisi masyarakat.

Kemudian penelitian kedua oleh Winy Astuti dan Ana Herdiana pada tahun 2009 berjudul ‘Perencanaan Partisipatif pada Tingkat Kelurahan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Pemukiman Kumuh Perkotaan’. Penelitian ini mencari konsep model pemberdayaan masyarakat pemukiman kumuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada pemukiman kumuh perkotaan yang berkelanjutan, dengan menggunakan PAR (*Participation Action Research*) dan juga menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD).

Mengacu dari penelitian sebelumnya, komunikasi pembangunan dalam tindak partisipasi digunakan untuk mengukur sejauh mana peran komunikasi bertindak dari permasalahan yang ada di perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang menggunakan komunikasi pembangunan untuk menggerakkan masyarakat yang lebih berfokus pada permasalahan sampah yang ada. Sehingga dalam penelitian tindakan ini komunikasi pembangunan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dengan membuat suatu program yang melibatkan warga dari RW 03 dan RW 06 Sunter Agung untuk membuat sebuah gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui komunitas dengan berkolaborasi dengan komunitas lingkungan sebagai *stakeholder*. Program yang akan berjalan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo (2004) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam rangka kegiatan pembangunan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya program yang nanti akan dibuat juga harus berasal dari masyarakat, bukan dari peneliti yang sebagai fasilitator. Fasilitator pada hal ini

hanya bertugas dalam memberikan stimulus dan mendampingi masyarakat supaya program yang berjalan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program.

Permasalahan sampah yang ada di wilayah Sunter Agung, menggambarkan jika sistem penanganan sampah yang selama ini diimplementasikan oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar masih memiliki kekurangan dan terbatas, sehingga dalam program ini juga melibatkan pihak Kelurahan Sunter Agung sebagai *stakeholder*. Pengelolaan sampah dengan program yang baru dan melibatkan masyarakat dalam sebuah komunitas di dalamnya adalah sebuah alternatif yang tepat untuk dilakukan. Melalui program berbasis komunitas ini, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar hingga berjalan terus menerus sehingga akan menghasilkan output dalam bentuk perubahan sosial untuk mengatasi permasalahan sampah.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat Sunter Agung khususnya RW 03 dan 06 untuk menerapkan perubahan tersebut dalam menjalankan program secara berkelanjutan, tanpa harus bergantung pada institusi lembaga pemerintah. Jika dikembangkan, strategi dalam membangun kembali program terdahulu ini akan menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan yang mampu mempertahankan dan menciptakan pembangunan itu sendiri tanpa batasan (Moldan dan Dahl, 2007). Sehingga dengan adanya suatu strategi pembangunan jangka panjang, masyarakat nantinya akan lebih sadar dengan lingkungannya serta mendorong mereka untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam membangun partisipasi masyarakat RW 03 dan RW 06 Sunter Agung dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program pengelolaan sampah melalui komunitas di lingkungan RW 03 dan RW 06 Sunter Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmu komunikasi, diantaranya:

1. Diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan kajian komunikasi pembangunan dalam ranah ilmu komunikasi.
2. Diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan konsep-konsep komunikasi pembangunan khususnya partisipatoris, dalam penelitian tindakan (*action research*).
3. Diharapkan dapat menjadi masukan penelitian kepada peneliti lain di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi diantaranya:

1. Mampu memberikan gambaran perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia berdasarkan kajian komunikasi pembangunan.
2. Memberikan manfaat praktis untuk lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, khususnya yang menangani masalah pengelolaan sampah berbasis komunitas.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Pembangunan (Lingkungan) dan Perubahan Sosial

Menurut Hamijoyo (2005, h. 138) Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, karena pembangunan membutuhkan kontribusi dari komunikasi. Dengan begitu komunikasi memiliki peran yang tidak biasa bagi pelaksana pembangunan (Hamijoyo, 2005). Pada dasarnya, Pembangunan merupakan harapan masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil para pemimpin, yang disusun dalam suatu perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan (Harun & Ardianto, 2011, h.249). Sehingga dalam pengertian komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan rencana pembangunan pada suatu negara (Harun dan Ardianto, 2011:161). Mefalopulos (dalam Dasgupta, 2009), mengemukakan pentingnya dari komunikasi pembangunan yaitu menciptakan adanya partisipasi, dialog, dan penyebaran pengetahuan. Komunikasi pembangunan di Indonesia memiliki tujuan yang penting yaitu dalam rangka pembangunan masyarakat yang menyeluruh dan bersifat membangun suatu pembaharuan masa kini dan masa yang akan datang (Cangara, 2017). Tujuan dari komunikasi pembangunan juga dijelaskan oleh Quebral (dalam Harun dan Ardianto, 2011) bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya mengenai cara-cara menciptakan perubahan perilaku, anggapan, atau sikap individu, tetapi perubahan sosial dari masyarakat itu sendiri secara keseluruhan.

Pelaksanaan komunikasi pembangunan haruslah diimbangi dengan keadaan karakter komunikasi dari masyarakat yang mengandung unsur komunikasi seperti komunikator, isi pesan, saluran komunikasi, dan sasaran komunikasi (Tahoba, 2011, h. 189). Indonesia kini kerap menggunakan strategi pembangunan dengan memakai pendekatan *bottom-up* yang berorientasi pada masyarakat dalam suatu pembangunan (Cangara, 2017). Fungsi dari komunikasi dalam pembangunan yaitu proses untuk memperoleh dukungan serta peran serta masyarakat dalam melaksanakan rencana pembangunan (Rogers, 2003). Keberhasilan pada program pembangunan dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat (Patterson & Radtke, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dengan berbagai cabang komunikasi yang lain, salah satunya dengan komunikasi lingkungan, dikarenakan komunikasi lingkungan memiliki banyak manfaat secara umum, bersifat membangun untuk memunculkan kesadaran masyarakat dalam berperan aktif pada pengelolaan lingkungan, hingga mendorong adanya program pembangunan (Herutomo, 2013). Dalam buku yang dikutip oleh Surna dan Harry (dalam, Kamaruddin, 2014) berjudul “*Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1992 : 20 tahun Setelah Stockholm*”, pada awalnya komunikasi lingkungan mulai dikenalkan dalam konferensi Stockholm di tahun 1972 yang membahas mengenai perkembangan pembangunan dalam lingkup lingkungan (*environmental development*), dalam slogannya “Hanya Satu Bumi” konferensi ini berupaya dalam mendorong negara lain untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan mencoba memecahkannya dengan bekerjasama oleh pihak tertentu atau dengan

perjanjian tingkat internasional. Hasil dari konferensi tersebut mengelompokkan lima aspek utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan (Kamaruddin, 2014). Setelah sepuluh tahun dari konferensi Stockholm, sebanyak 105 negara hadir dalam konferensi di Nairobi, Kenya. Konferensi ini merupakan perwujudan dari peningkatan kesadaran lingkungan yang sifatnya global. Pada deklarasi yang diadakan di Nairobi juga membahas mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan pada aspek pembangunan sosial-ekonomi dalam lingkup lingkungan. Selanjutnya, untuk memperingati Konferensi Stockholm kedua puluh tahun pada tahun 1992, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Maurice Strong selaku Sekretaris Jendral pada Konferensi Stockholm, yang kini menjabat sebagai Ketua KTT Bumi, mengungkapkan adanya tujuan berbeda antara Konferensi Stockholm 1972 dan KTT Bumi. Pada Konferensi Stockholm bertujuan memasukkan isu lingkungan pada agenda Internasional, sedangkan dalam Konferensi Rio tahun 1992 menekankan pada penggabungan antara isu lingkungan mengenai pembangunan.

Berbicara mengenai komunikasi lingkungan, Dahlan (1986) mengungkapkan bahwa komunikasi lingkungan menjadi pembahasan pada tahun 80an diberbagai negara sebagai suatu dilema dalam memilih antara lingkungan dengan pembangunan, karena isu lingkungan pada saat itu merupakan hal yang baru dan dipandang sebagai hambatan serta saingan bagi pembangunan. Komunikasi lingkungan menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan strategi dengan komunikasi dan menghasilkan sarana untuk mendorong adanya efektivitas

dalam membuat suatu kebijakan, partisipasi masyarakat, serta penerapannya pada lingkungan (Oepen, dalam Wahyudin, 2017). Komunikasi lingkungan juga dijelaskan oleh Cox (dalam Awza dan Yazid, 2010) bahwa komunikasi lingkungan sifatnya praktis dan berguna dalam memahami isu lingkungan pada masyarakat. Dampak dari kehadiran komunikasi lingkungan dalam perkembangannya terletak pada lingkungan alam seperti banjir, bencana alam dan lingkungan yang dibuat oleh manusia seperti masalah kesehatan, masalah pengelolaan lingkungan, berupa sampah dan limbah (Dahlan, 1986). Upaya dalam komunikasi lingkungan dapat digunakan dalam dua tingkatan, yang pertama adalah tingkat sistemik, tujuannya dengan mengembangkan kembali faktor sistem pembangunan dengan lingkungan yang direncanakan, selain itu juga mengembangkan partisipasi untuk memantau penurunan dari lingkungan, kedua yaitu tingkat dukungan yang sempit secara teknis, agar dapat mengkombinasi sistem yang ada dengan mengupayakan dalam penyebarluasan informasi dan mendorong orang untuk lebih menerima ide pada pembangunan terkait lingkungan (Cox, dalam Awza dan Yazid, 2016). Selain itu, dilansir dari portal media online kompas.com, Peneliti mendapatkan bahwa dalam komunikasi lingkungan memiliki fungsi utama, yaitu fungsi strategis dan fungsi teknis. Fungsi strategis dalam komunikasi lingkungan untuk menggerakkan kesadaran Pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan fungsi teknisnya yaitu menginformasikan kepada masyarakat terkait isu lingkungan yang berkembang saat ini melalui berbagai media (Ariestya, 2017).

Dalam penjelasan Dahlan (1986), untuk mengatasi permasalahan lingkungan, Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan dan mengembangkan sektor komunikasi lingkungan mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan untuk menerapkan kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan membuat program untuk membenahi kualitas lingkungan yang sebelumnya. Dahlan juga menambahkan bahwa munculnya kebijakan yang mengangkat konsep “pembangunan yang berwawasan pada lingkungan”, hal ini diharapkan tidak hanya untuk memenuhi pembangunan masa depan, akan tetapi juga dalam tahap pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Komunikasi lingkungan dengan sifatnya tersebut diharapkan juga untuk menjadi suatu proses yang berdampak bagi masyarakat dalam menuju perubahan sosial untuk diterapkan sehingga menjadikan masyarakat yang mandiri (Dahlan, 1986).

Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution, 2009, h. 28) menjelaskan pembangunan adalah jenis perubahan sosial yang terdapat gagasan baru untuk dikenalkan pada suatu sistem sosial dalam menghasilkan pendapatan perkapita serta kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan tahap produksi yang lebih modern dan pengorganisasian yang lebih memadai. Dengan kata lain, Rogers menganggap bahwa komunikasi pembangunan merupakan dasar dari adanya perubahan sosial dan harus dikaitkan ke arah perubahan tersebut. Kemudian komunikasi dalam perubahan untuk pembangunan cenderung kepada masyarakat (Dilla, 2007, h. 185). Strategi komunikasi yang digunakan dalam tahap pembangunan semestinya dapat mencapai, membangun, membimbing, dan membuat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat (James, dalam Dilla, 2007,

185). Dalam strategi komunikasi yang dikatakan oleh James, dikembangkan oleh Dilla bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosial melalui pemilihan konten untuk penyebaran informasi sebagai pertimbangan sampai gagasan dalam pembangunan dapat sesuai target dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada program pembangunan. Partisipasi masyarakat di sini yaitu untuk memperbaiki permasalahan sosial dan melakukan sebuah perubahan, serta mempelajari dari permasalahan pembangunan (Mahmudi, 2004).

Komunikasi pembangunan memiliki peran dalam tahap perubahan sosial sebagai pembangkit, penentu arah, dan mengendalikan perubahan supaya dapat bermanfaat dan terstruktur (Harun dan Ardianto, 2012). Komunikasi pembangunan menurut Harun dan Ardianto dipandang sebagai instrumen yang bertugas dalam mengidentifikasi tanda dalam perubahan sosial, serta sebagai proses psikologis yang berhubungan erat dengan segi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam perubahan. Dengan adanya kebenaran dari sumber, isi konten, serta media komunikasi berdampak langsung untuk menghadirkan adanya perubahan perilaku (Harun dan Ardianto, 2012). Hingga pada akhirnya, proses perubahan sosial harus terdapat tahap penyesuaian secara bersama-sama antar gagasan oleh komunikator dan khalayak (Nasor, 2013).

Perubahan banyak dilakukan di Indonesia hampir di tiap sektor seperti ekonomi, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, serta Pemerintah yang masih kurang berperan bagi masyarakat (Kamaruddin, 2014). Perubahan hadir dikarenakan permasalahan muncul dari strategi pembangunan yang berfokus pada

masyarakat masih kurang penerapannya dan belum benar-benar dianggap penting, hingga perubahan yang terjadi tidak sepenuhnya berubah dan belum sempurna (Dilla, 2007). Permasalahan pembangunan yang timbul akibat perubahan dapat berdampak bagi lingkungan, dengan disebabkan oleh lingkungan alam itu sendiri dan dari faktor buatan manusia (Dahlan, 1986).

Dengan uraian penjelasan di atas, pada komunikasi pembangunan peneliti dapat di posisikan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang membantu memecahkan permasalahan serta membawa masyarakat menuju perubahan guna membangun kehidupan yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. Agen perubahan (*agent of change*) yaitu orang yang berperan dalam membantu melaksanakan perubahan sosial (Havelock, dalam Dilla, 2011). Dalam perubahan tersebut dibutuhkan proses komunikasi untuk menghubungkan masyarakat dengan perubahan yang mereka inginkan dengan mengaplikasikan komunikasi pembangunan di dalamnya. Menurut penjelasan dari Rakhmat (1999) perubahan seperti ini merupakan perubahan yang terencana dikarenakan polanya yang tersusun dan telah menetapkan tujuan dari perubahan itu sendiri. Serta penelitian ini mengupayakan adanya tindak partisipasi masyarakat langsung dalam memperbaiki keadaan sosial dan mempedulikan lingkungan sekitar mereka.

Dalam proses penelitian yang mengacu dari penjelasan di atas, komunikasi pembangunan dalam permasalahan sampah ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan untuk mengarah pada perubahan yang akan datang. Sehingga dengan menerapkan konsep partisipatif, masyarakat akan tergerak dalam memperbaiki permasalahan yang ada. Peneliti dalam menerapkan komunikasi pembangunan,

memposisikan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang membantu memecahkan permasalahan serta membawa masyarakat menuju perubahan guna membangun kehidupan yang lebih baik di lingkungan sekitarnya. nanti akan melibatkan warga dari RW 03 dan RW 06 Kelurahan Sunter Agung yang tergabung ke dalam komunitas serta melibatkan fasilitator, yang sebelumnya telah diketahui permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait sampah dan pengolahan RW sekitar melalui pelaksanaan FGD “Bisa Faster” oleh peneliti. Selain menjadi fasilitator, peneliti juga dianggap sebagai katalisator dalam menggerakkan warga untuk melaksanakan program perubahan. Dengan kata lain, Rogers (2003) menyatakan bahwa fasilitator juga saling berkaitan melalui komunikasi yang terjalin antara masing-masing sistem sosial, dengan membimbing masyarakat dalam menggagas perubahan dan menghubungkan masyarakat dengan pihak yang mungkin diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2.2 Pengembangan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pada dasarnya *community development* merupakan kegiatan dari pengembangan masyarakat yang mencakup keadaan sosial dalam memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan adanya konsep berkelanjutan (*sustainable*) di dalam karakteristik dari *community development* yang berfokus pada peran dan kesejahteraan masyarakat (Kamaruddin, 2014). Pelaksanaan dari pembangunan berkelanjutan disepakati dengan adanya pertemuan oleh 189 negara pada tahun 2000 dengan membuat istilah lain dari pembangunan berkelanjutan, yaitu *The Millenium Development Goals* (MDG's) yang berjalan hingga tahun 2015 (Ishartono dan Raharjo, 2016).

Kemudian, Indonesia mencetuskan konsep pembangunan berkelanjutan pada pelaksanaan Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2004 (Hardjasoemantri, 2005). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 MDG's digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang bertujuan untuk melanjutkan kegiatan serta memastikan keinginan dari MDG's dapat tercapai dan berlangsung seterusnya (Ishartono dan Raharjo, 2016). Target yang terdapat pada SDG's dapat dikembangkan dan diimplementasikan sebagai gabungan ilmu pengetahuan (untuk masyarakat) dan kebijakan, hingga ilmu pengetahuan memiliki peran menjadi penasehat yang terpercaya dalam membantu masyarakat untuk mencapai keinginan mereka (Leach, dalam Griggs, et al. 2014).

Menurut penuturan dari Dahlan (1986) dalam komunikasi pembangunan mengharuskan adanya dorongan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan, diawali dengan mengupayakan suatu gagasan baru dalam pembangunan tersebut. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan, dengan mengharapkan program tersebut dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat (Marek dan Maccini, dalam Rijadi, 2010). Selain itu, menurut Salim (dalam Rahadian, 2016) juga menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu untuk memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat, mencukupi kebutuhan dan angan dari masyarakat.

Terdapat beberapa aspek yang diangkat pada konsep pembangunan berkelanjutan, di antaranya yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Fauzi, 2014). Selain itu juga terdapat hal yang mendasari, dengan cara memperhatikan gabungan diantaranya dalam mencapai tujuan masyarakat untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi dan menghasilkan keinginan mereka (Griggs, et al. 2014). Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Dahlan (1986) bahwa dengan munculnya kebijakan yang mengangkat konsep “pembangunan yang berwawasan pada lingkungan”, hal ini diharapkan tidak hanya untuk memenuhi pembangunan masa depan, akan tetapi juga dalam tahap pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Kemudian Fauzi (2014) juga menjelaskan jika pembangunan berkelanjutan dapat digambarkan sebagai perbaikan kualitas kehidupan yang didasarkan oleh faktor lingkungan (*carrying capacity*). Terjadinya pembangunan berkelanjutan diperlukan upaya untuk mewujudkannya (Sutamihardja, dalam Rahadian, 2016), antara lain:

1. Memanfaatkan hasil pembangunan dengan cara meminimalisir sumber daya alam yang digunakan.
2. Menjaga kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan.
3. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang bertujuan membangun pertumbuhan ekonomi.
4. Mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang terus menerus mulai dari sekarang hingga ke depannya.
5. Menjaga manfaat dari pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki pengaruh jangka panjang.
6. Mempertahankan kualitas dalam kehidupan manusia dari generasi ke generasi sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

Selain terdapat aspek dan konsep, pembangunan berkelanjutan juga memiliki komponen yang harus diperhatikan, yaitu dengan pembangunan menjamin adanya pemerataan, pembangunan yang mementingkan keanekaragaman, pembangunan dengan pendekatan yang berintegratif, dan pembangunan yang berjangka panjang (Rahadian, 2016).

Pembangunan berkelanjutan hadir untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Dengan adanya konsep yang terdapat pada pembangunan secara berkelanjutan, peneliti dapat mengimplementasikan program pemberdayaan kepada masyarakat sekitar dengan membuat komunitas yang di dalamnya mencakup tiap elemen masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang bersifat *sustainability* serta dapat mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah.

2.3 Komunikasi Partisipatoris yang Berhubungan dengan Keterlibatan

Masyarakat dalam Pembangunan

Munculnya komunikasi partisipatoris berawal dari pemikiran Paulo Freire, ia adalah seorang pendidik dan ahli filsafat dari Brazil yang mementingkan pembangunan dan pengembangan masyarakat sebagai sebuah kegiatan yang berorientasi dengan masyarakat (Chitnis, 2005). Penelitian mengenai partisipasi menurut Betit (2004) berkembang menjadi sebuah pemecahan masalah dalam perencanaan strategis sesuai dengan nilai dari pengembangan organisasi. Komunikasi partisipasi berupaya meningkatkan fungsi dari kelompok dalam melibatkannya hingga dapat mempengaruhi seluruh kelompok yang lain (Betit, 2004). Komunikasi Partisipatoris diposisikan untuk memperbaiki permasalahan

sosial dan melakukan sebuah perubahan, serta mempelajari dari permasalahan atas perubahan tersebut (Mahmudi, 2004). Stringer (dalam Betit, 2004) menjelaskan hal ini termasuk pada penelitian pembangunan masyarakat, pemberdayaan melalui stakeholder, dan perubahan sosial. Dalam penelitian komunikasi partisipatoris, seorang peneliti dan subjek penelitian hampir tidak dapat dibedakan, dengan begitu penciptaan lingkungan pada penelitian serta pemilihan partisipan sangat berpengaruh (Argyris & Schon, 1991, dalam Betit, 2004). Menurut White keikutsertaan masyarakat dalam program pengembangan memiliki unsur yang memiliki pengertian:

"Participation in development is the conscious decision to reach out to and involve those people that would be most affected by the proposed development program. Specifically, participation refers to involving the un-empowered, the marginalized and the poorest people in any society" yang jika diartikan sebagai tindakan dalam mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam program atau agenda yang sudah direncanakan, yang nantinya akan menguntungkan masyarakat itu sendiri. (dalam Chitnis, 2005, h. 69)

Dalam buku Hamijoyo (2005) yang berjudul *"Komunikasi Partisipatoris Pemikiran dan Implementasi Komunikasi dalam Pengembangan Masyarakat"* menyatakan, jika keikutserataan masyarakat tidak hanya dicapai dengan menggabungkan orang-orang dan membentuk kelompok, akan tetapi juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) pada program yang nantinya akan dilaksanakan. Sehingga dengan komunikasi partisipatoris diupayakan agar tindakan tidak hanya dilakukan oleh *agent of change* (ahli/pakar, lembaga/perusahaan/organisasi) akan tetapi, nantinya dapat dilakukan oleh

khalayak (komunitas/masyarakat lokal) dengan kerjasama antara seluruh pihak penyelenggara. Menurut Jamieson (dalam Mikkelsen, 2011), pada komunikasi pembangunan partisipatif mengenali adanya dua perspektif, yang pertama yaitu dengan menyertakan masyarakat mulai dari tahap perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sehingga perspektif dari masyarakat dapat dilibatkan secara keseluruhan. Kedua, kegiatan pembangunan tidak dapat terlepas dari adanya *feedback* masyarakat.

Menurut Green (1995) dalam jurnal Cockburn dan Trentham (2002, h. 21) berjudul 'Participatory action research: Integrating community occupational therapy practice and research', pada penelitian partisipatoris, masyarakat dapat diasumsikan memiliki pengalaman dan paham mengenai situasi yang diperlukan oleh masyarakat lainnya dalam mewujudkan perubahan sosial. Dengan begitu, komunikasi partisipatoris merupakan proses menggabungkan pengalaman masyarakat lain melalui berbagai informasi, mengamati secara sistematis, merefleksikan dan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan. Sehingga perubahan datang bisa dalam bentuk pemberdayaan individu atau kelompok untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Maksud dari PAR yaitu untuk membantu kelompok orang di suatu wilayah tertentu dalam mengambil tindakan untuk mengurangi suatu masalah yang ada di wilayah mereka (Wilcock, 1991 dalam Cockburn dan Trentham, 2002, h. 22).

Hamijoyo (2005) melalui bukunya, membagi adanya komunikasi partisipatoris menjadi dua macam, antara lain partisipatoris semu dan partisipatoris murni. Pengertian dari partisipasi semu adalah partisipasi yang

digunakan oleh individu atau kelompok khusus untuk dan tujuan tersendiri, pada hal ini masyarakat hanya menjadi objek. Pelaksanaan komunikasi partisipatoris semu biasanya berbentuk gerakan masyarakat dalam mengelabui seakan-akan masyarakat turut berpartisipasi yang bertujuan program yang telah direncanakan dengan pihak pengambil kebijakan sudah dibenarkan. Pendekatan yang dilakukan juga kepada tokoh masyarakat supaya dapat sebagai penengah bagi masyarakat, akan tetapi keputusan dari perencanaan tetap pada Pemerintah (Hamijoyo, 2005). Lain dari partisipatoris semu, Hamijoyo (2005) menjelaskan jika partisipatoris murni merupakan jenis partisipatoris yang paling sesuai. Partisipatoris murni melihat pada kekompakan dari masyarakat dimulai saat pemikiran solusi permasalahan sampai dengan evaluasi program. Masyarakat ikut berperan aktif pada pelaksanaan program hingga ketahap lanjutan. Budaya seperti ini pantas untuk digunakan Indonesia karena dengan budaya yang gotong royong dapat mempererat tali persaudaraan sesama (Hamijoyo, 2005).

Kogoya *et al* (2015) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Kogoya *et al* (2015) juga menyebutkan bahwa definisi partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana (pemerintah) dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil

pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat diukur dari besarnya peran dan wewenang masyarakat dalam menentukan, menyediakan mengaudit dan memelihara infrastruktur yang dibangun.

Selain itu dalam penelitian dari Claridge (2004) yang berjudul “*Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*” terdapat beberapa pendapat terkait *Participation as an End or Means*. Seperti Ross *et al* (dalam Claridge, 2004) mengidentifikasi dua tema yang muncul dalam literatur tersebut, pertama partisipasi sebagai pendekatan, ideologi, etos tertentu untuk pengembangan masyarakat, dan kedua partisipasi sebagai metode, pedoman dan praktik untuk melibatkan masyarakat umum dalam kegiatan yang sudah direncanakan. Ada banyak pendapat dan diskusi mengenai hal ini diantaranya Nelson dan Wright (1995) menjelaskan “*Participation as an End or Means as the distinction between instrumental and transformative participation*” yang memiliki makna bahwa *Participation as an End or Means* digambarkan sebagai instrumental dan transformasi. Melengkapi hal tersebut Macnaghten dan Jacobs (1997) menjelaskan “*Participation as an End or Means as value based or instrumental. The means or ends argument is comparable to efficiency, and empowerment and equity*”.

Claridge (2004) juga berpendapat bahwa efisiensi partisipasi digunakan sebagai alat untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan pemberdayaan serta kesetaraan dalam partisipasi dijadikan sebagai proses yang meningkatkan kapasitas individu untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri terutama untuk

kelompok-kelompok kecil. Pada hal yang lebih mendasar, Nelson dan Wright (1995) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara “*participation as a means*”, yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara lebih efisien, efektif atau murah, sedangkan “*participation as an end*” diartikan sebagai sarana untuk mengendalikan setiap perkembangannya melalui komunitas ataupun kelompok.

Penelitian partisipasi memiliki batasan pada hal-hal yang lebih umum. Pernyataan tersebut didasari oleh pendapat Campbell (dalam Claridge, 2004) yang menjelaskan bahwa terdapat empat kendala partisipasi yaitu dari kelembagaan, pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Selain itu, meskipun penerapan partisipasi dapat menjamin suatu keberhasilan suatu program atau tujuan dari suatu lembaga, penerapan partisipasi pada dasarnya lebih efisien diterapkan pada program yang berkelanjutan. Selanjutnya, partisipasi juga memiliki tujuan-tujuan, bahkan aturan yang mungkin tidak realistis karena penentuan dan penerapan dari norma serta tujuan memiliki proses jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini yang menjadi beban tuntutan partisipan dalam prosesnya. Dengan keadaan tersebut, pemanfaatan partisipasi masyarakat terutama dengan melibatkan khalayak yang banyak, dapat menjadi hambatan untuk mengontrol secara penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program.

Kemudian, ada pendapat berbeda diutarakan oleh Mhagama (2016) dalam penelitiannya, mengutip dari Arnstein (1969), mengatakan bahwa proyek partisipasi dalam komunitas dapat mendorong terjadinya partisipasi di tingkat yang berbeda (eksternal). Selain itu Melkote (dalam Colle, 2014) menjelaskan, meskipun partisipasi adalah kompoen yang tak terhindarkan, dari proses

pembangunan dan masyarakat, tapi selama suatu komunitas atau kelompok dapat memfasilitasi tujuan dan agenda pembangunan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan yang baik, meskipun di dalamnya tidak ada partisipasi yang maksimal. Dukungan dari komunitas atau kelompok yang dapat mendukung terbentuknya pembangunan yang baik itu seperti manajemen dalam suatu komunitas, standart operasional, dan akses teknologi.

Arnstein (1969) mengungkapkan terdapat tingkat partisipasi yang dikenal dengan “Delapan Tangga Partisipasi Publik”. Dalam tingkat partisipasi ini memiliki tiga sifat dari beberapa tingkatan partisipasi, di antaranya adalah tidak ada tindak partisipasi, partisipasi yang simbolik dan partisipasi penuh. Arnstein (1969) menjelaskan kembali, terkait dua bentuk partisipasi, yaitu manipulasi dan terapi, yang di dalamnya tidak ada tindak partisipasi. Tingkat manipulasi dijelaskan jika pemegang kekuasaan hanya memilih beberapa perwakilan masyarakat untuk terlibat dalam membuat kebijakan. Pada tingkat terapi, masyarakat diharuskan untuk mengikuti dalam sebuah kebijakan, akan tetapi masyarakat hanya dijadikan audiens untuk menerima kebijakan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan.

Menurut Arnstein (1969) pada partisipasi simbolik terdapat tiga bentuk, antara lain pemberian informasi, konsultasi, dan konsensi. Pada pemberian informasi, pemegang kekuasaan memberikan informasi untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk bertanya ataupun melakukan kritik, akan tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan atas hal itu. Tahap konsultasi, pemegang kekuasaan turut mengundang masyarakat untuk berdiskusi bersama dan

memberikan saran dan kritik terhadap kebijakan yang ada, akan tetapi mereka tidak memiliki wewenang dalam menentukan arah kebijakan. Dalam tahap konsensi, pemegang kekuasaan merasa telah melakukan saran-saran yang diterima masyarakat, akan tetapi saran tersebut tidak mengubah kebijakan yang dibentuk.

Tingkat partisipasi penuh memiliki 3 bentuk antara lain kemitraan, pemberian wewenang, dan kontrol terhadap warga Negara. Pada tingkat kemitraan, dijelaskan jika pemegang kekuasaan melakukan berbagai cara melalui bentuk negosiasi dengan masyarakat. Kemudian dalam tahap pemberian wewenang, masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dibandingkan dengan pemegang kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, pada tingkat kontrol terhadap warga Negara, masyarakat memiliki hak yang besar untuk memberikan wewenang, pada tingkat ini masyarakat berperan sampai pada evaluasi kegiatan dengan pihak pemegang kekuasaan.

Peran komunikator dalam pembangunan sangatlah penting untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pihak yang berkaitan pada proses pembangunan, komunikator tersebut diharuskan menganut sistem tradisional pada dimensi baru di masyarakat sebagai seorang fasilitator (Syarah, 2016). Akhir dari komunikasi partisipatoris yaitu, di mana khalayak memahami peran masing-masing di tiap keadaan, dengan kebersamaan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, membuat perencanaan, dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan hidup mereka (Hamijoyo, 2005).

Jenis partisipasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu partisipatoris murni, merujuk pada delapan tingkat partisipasi dari Arnstein (1969) yang

melibatkan langsung masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Dalam melakukan program ini, peneliti bekerja sama dengan warga RW 03 dan RW 06 Sunter Agung sehingga dalam setiap rencana akan selalu dibicarakan secara keseluruhan oleh warga hingga keputusan akan ada di tangan masyarakat sendiri. Nantinya Warga RW 03 dan RW 06 Sunter Agung akan memterbentuk dalam komunitas dalam mengenali permasalahan dan diajak untuk melaksanakan pada suatu program untuk memperbaiki keadaan dan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Cangara (2017), partisipatoris murni mengajak masyarakat dalam menemukan jalan keluar sehingga pencapaian program tersebut dapat dinikmati oleh mereka sendiri.

2.4 Posisi Partisipasi dalam Komunikasi Pembangunan Modernisme

Pembangunan pada masa orde baru merupakan pemerintahan yang otoriter dan cenderung menerapkan sistem pembangunan dengan pendekatan *top-down* yang berasal dari pemerintah pemegang kekuasaan mengarah ke masyarakat (Cangara, 2017). Pada pendekatan pembangunan tersebut mengakibatkan adanya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakatnya (Waskita, 2005). Sehingga setelah berakhirnya masa orde baru, penerapan sistem *top-down* dirasa masih kurang tepat atau memang dinilai salah dan mengharuskan untuk merubah cara pandang yang fokus pada berbagai aspek, terutama menjadikan manusia sebagai subyek dalam merancang dan melaksanakan pembangunan (Waskita, 2005). Pendekatan yang semula *top-down* mengalami perubahan menjadi pendekatan *bottom-up* yaitu Pemerintah pemegang kekuasaan lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat (Cangara, 2017). Pendekatan *bottom-up* dapat

menstimuli peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dikarenakan masyarakat lebih memahami latar belakang masalah yang mereka hadapi (Sadjuri, 2010).

Menurut Tjokrowinoto dalam Mardikanto (2015), pembangunan yang berfokus pada masyarakat merupakan kegiatan dalam pemberdayaan (*empowerment*). Kata dasar “*empowerment*” dan “*empower*” menurut Prijono dan Pranarka (1996, dalam Sadjuri, 2010) diartikan dengan pemberdayaan dan memberdayakan. Pemberdayaan menjadi sebuah program dalam paradigma pembangunan yang berfokus pada masyarakat (*people based development*) (Adimihardja, 2001). Dengan begitu, pada program pembangunan ini masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan dari pembangunan tersebut (Faizal, 2015).

Pemberdayaan dijelaskan secara menyeluruh oleh Prasajo (2004) dengan penelitiannya yang berjudul “*People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*” bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam rangka kegiatan pembangunan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemberdayaan dalam hal ini juga memiliki beberapa strategi, antara lain memberdayakan masyarakat sebagai suatu subyek, memanfaatkan proses pembangunan atau pemberdayaan dengan tepat, menggerakkan sumber daya manusia sesuai dengan kualitasnya, dan mengerahkan peran dari Pemerintah untuk memberi fasilitas serta menyusun pelaksanaan pembangunan (Prasajo, 2004). Pemberdayaan dianggap sebagai tahapan dalam perubahan yang memposisikan produktivitas dan upaya pada masyarakat, sehingga bagian

pentingnya pada proses pemberdayaan yaitu partisipasi, yang dapat membuat proses pembangunan berjalan secara menyeluruh mulai dari masyarakat yang dirasa masih lemah untuk membantu mereka memperbaiki hidupnya sekaligus menggapai apa yang mereka inginkan (Hikmat, dalam Prasajo, 2004). Dengan begitu, tujuan pembangunan dari pemberdayaan melalui partisipasi adalah untuk memberikan kehidupan yang layak dan sepenuhnya kepada masyarakat sendiri (Adi, dalam Prasajo, 2004).

Pada dasarnya, pemberdayaan berjalan hingga masyarakat mencapai tujuan dan mampu menerapkan kemandirian (Sumodiningrat, dalam Teguh, 2004). Supaya tidak terjadi permasalahan yang sama, dibutuhkan suatu proses dalam penerapan kemandirian tersebut (Hidayah, 2013). Proses untuk menuju pemberdayaan memiliki beberapa tahapan (Teguh, 2004):

1. Tahap pemahaman serta penyadaran masyarakat dalam membentuk sikap untuk lebih peduli terhadap dirinya masing-masing.
2. Tahap perubahan yang berfokus pada pengetahuan, membentuk ketrampilan supaya dapat mencangkup wawasan yang lebih luas dan berperan aktif dalam proses pembangunan.
3. Tahap mengembangkan kemampuan dalam berpikir, agar dapat membentuk gagasan atau ide baru dalam menuju masyarakat yang mandiri.

Pembangunan yang tertuju pada pemberdayaan, membutuhkan suatu upaya dalam mempersuasi, mengedukasi, dan bimbingan dalam menggali kemampuan diri dan lingkungan atau dengan kata lain komunitasnya (Dilla, 2007). Tidak hanya menggunakan sumberdaya setempat untuk kebutuhan masyarakat, akan

tetapi juga dalam melindungi hak-hak dan prosesnya sesuai pada nilai sosial budaya, ekonomi, dan politik yang lebih berkembang (Kasisdi, dalam Dilla 2007). Shardlow memandang bahwa pemberdayaan membicarakan cara individu, kelompok maupun komunitas berupaya mengendalikan kehidupan masing-masing dengan membentuknya sesuai dengan apa yang diharapkan (Dilla, 2007).

Paradigma pembangunan Indonesia pada masa orde baru tidak terlepas dari ketiga paradigma, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan dan teori sistem dunia (Servaes, 2002). Ketiga teori yang mendasari bahwa paradigma Indonesia saat itu berasal dari atas ke bawah (*top-down*) yang bersifat satu arah, sehingga proses perubahan dalam pembangunan berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan sumber dana (Dilla, 2007). Tahun 70an, hal yang diharapkan dari perspektif modernisme lambat laun menghilang, diikuti dengan tahun 80an negara-negara berkembang mulai terjadi kemunduran dalam kehidupannya (Chambers, dalam Servaes, 2002). Seperti yang sudah diuraikan di atas mengenai perubahan pembangunan Indonesia, pendekatan dengan perspektif modernisme terjadi ketidak sesuaian dan kesalahan yang mendorong pembangunan untuk bisa memperbaiki kualitasnya dengan perspektif yang baru (Waskita, 2005).

Mengacu pada teori ketergantungan, perspektif modernisme menjelaskan bahwa pihak negara ketiga masih cenderung bergantung pada negara maju, dikarenakan negara maju menawarkan pembangunan dalam sektor baru pada negara berkembang tersebut (Suparjan dan Suyatno, 2003). Selain itu, dalam persepektif modernisme tidak memikirkan pada konteks budaya untuk pembangunan yang sifatnya *a-historis* (Salim, dalam Lindawati, 2013). Hal

tersebut terlihat jelas jika perspektif ini masih menganut, pada sistem Barat (*westerncentric*) dan bersifat etnosentris dengan cara imperialisme budaya maupun imperialisme media, yang berarti modernisme dapat dibantu dengan adanya media untuk mengenalkan pada nilai Barat dan menghilangkan budaya lokal atau tradisional (McQuail, dalam Servaes, 2005). Modernisme dinilai kurang sempurna dikarenakan telah menaruh kesalahan pada negara yang berkembang, hingga hal tersebut mendesak perubahan secara “*bottom-up*” dan memajukan komunitas lokal (Sevaes, 2007).

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, Peneliti akan menjelaskan perbedaan penelitian Peneliti dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai acuan dasar penelitian, yaitu Ajeng Rahmani Rijadi (2010), Winny Astuti dan Ana Hardiana (2009), Guntur Nandana (2016). Bentuk penelitian sebelumnya menggunakan dua penelitian ilmiah skripsi dari Universitas Indonesia, Depok dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta serta satu penelitian jurnal nasional dari Universitas Negeri Solo.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian Ajeng Rahmani Rijadi (2010) berjudul ‘Upaya-Upaya Tindak Lanjut Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas’. Pada penelitian ini merupakan tindakan (*action reserach*) yang membahas tentang program pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah ada dan berbasis komunitas di Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Penelitian dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan sampah secara berkelanjutan

dengan menjalankan program pengelolaan sampah yang telah berakhir pada komunitas di wilayah Jembatan Besi. Salah satu program pengelolaan sampah yang dilakukan adalah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau Community Based Solid Waste Management (CBWSM). Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian tindakan (*action research*). Hasil penelitian ini yaitu program pengelolaan sampah ESP (Enviromental Service Program) adalah program yang paling ideal di wilayah tersebut, karena sebelumnya komunitas juga sudah sadar dengan program tersebut tetapi belum dapat melakukan programnya sendiri sehingga memerlukan pendampingan supaya program terus berlanjut.

Selanjutnya penelitian terdahulu kedua oleh Winny Astuti dan Ana Hardiana (2009) berjudul 'Perencanaan Partisipatif Pada Level Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan'. Penelitian bertujuan untuk mencari konsep model pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Kumuh Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Pemukiman Kumuh Perkotaan yang Berkelanjutan dan untuk penerapan konsep model tersebut. Metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian tindak partisipatif (*Participatory Action Research/PAR*) dengan memilih sampel area atas dasar pertimbangan (*purposive sampling*). Peneliti menemukan bahwa kelembagaan masyarakat di lingkungan tersebut kurang memberi akses bagi *Social Inclusion Empowerment* maupun *security*. Sehingga hasilnya model PMPKB yang dimulai dari pemetaan masalah partisipatif sampai dengan peningkatan kapasitas dalam perencanaan partisipatif dapat memilah masalahnya sendiri. Serta dapat melihat lebih jauh

potensi dalam mengatasi masalah dengan menyusun program serta mengintegrasikannya dengan kota sebagai potensi/peluang mengatasi masalah.

Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga oleh Guntur Nandana (2016) yang diberi judul ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan (Studi Tentang Bank Sampah "Kasih" dan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)’. Penelitian memiliki tujuan dalam memahami latar historis pendirian Bank Sampah “Kasih” dan Bank Sampah “Gemah Ripah”, memahami bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kedua lembaga bank sampah tersebut dan memahami dampak yang dari partisipasi masyarakat didalam Bank Sampah terhadap keadaan ekonomi dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian studi deskriptif komparatif. Hasil dalam penelitian yang dilihat dari partisipasi masyarakatnya, didapat bahwa Bank Sampah Kasih memiliki latar historis pendirian yang lebih mendukung untuk potensi keberlanjutan masyarakat dan paling berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat dan lingkungan tersebut di bandingkan Bank Sampah Gemah Ripah.

Ketiga penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Pada ketiga penelitian tersebut belum ada pembahasan secara spesifik dari penelitian tindakan (*action research*) yang dikaitkan dengan kajian komunikasi pembangunan dengan paradigma partisipatoris. Sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan pembaharuan dalam penelitian tindakan (*action research*) yang dikaitkan dengan kajian komunikasi pembangunan mencakup komunikasi lingkungan yang berkaitan dengan

perubahan sosial menggunakan paradigma partisipatoris dengan membentuk model atau program yang akan Peneliti buat dengan komunitas yang peduli atau sadar akan permasalahan sampah yang ada di Sunter Agung yang bertujuan untuk menjadikannya pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

ASPEK	PENELITI		
	Ajeng Rahmani Rijadi (2010)	Winny Astuti dan Ana Hardiana (2009)	Guntur Nandana (2016)
JUDUL	Upaya-Upaya Tindak Lanjut Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas	Perencanaan Partisipatif Pada Level Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan (Studi Tentang Bank Sampah "Kasih" dan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan program pengelolaan sampah padat berbasis komunitas (CBSWM) di RW 04 Jembatan Besi, Jakarta Barat. 2. Menganalisis situasi kondisi pengelolaan sampah padat berbasis komunitas. 3. Memformulasikan dan melaksanakan solusi praktis dalam upaya tindak lanjut bagi kegiatan pengelolaan sampah padat berbasis komunitas di wilayah tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari konsep model pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Kumuh Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Pemukiman Kumuh Perkotaan yang Berkelanjutan. 2. Untuk penerapan konsep model Pengentasan Kemiskinan pada Pemukiman Kumuh Perkotaan yang Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami latar historis pendirian Bank Sampah "Kasih" dan Bank Sampah "Gemah Ripah" 2. Memahami bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kedua lembaga bank sampah tersebut. 3. Memahami dampak yang dari partisipasi masyarakat didalam Bank Sampah terhadap keadaan ekonomi dan lingkungan.
METODE	Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Penelitian tindakan (action research).	Metode yang digunakan yaitu Penelitian Tindak Partisipatif (Participatory Action Research) dengan pemilihan sampel area didasari atas pertimbangan (purposive sampling).	Metode penelitian studi deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif.
HASIL	Hasil penelitian menunjukan bahwa program yang dijalankan	Kelembagaan masyarakat di lingkungan tersebut kurang memberi akses	Bank Sampah Kasih memiliki latar historis pendirian yang lebih

	<p>Peneliti serta komunitas di wilayah Jembatan Besi yaitu program pengelolaan sampah ESP (<i>Enviromental Service Program</i>) adalah program yang paling ideal di wilayah tersebut, karena sebelumnya komunitas juga sudah sadar dengan program tersebut tetapi belum dapat melakukan programnya sendiri sehingga memerlukan fasilitator agar program berlanjut.</p>	<p>bagi Social Inclusion empowerment maupun security. model PMPKB yang dimulai dari pemetaan masalah partisipatif sampai dengan peningkatan kapasitas dalam perencanaan partisipatif dapat memilah masalahnya sendiri. Serta dapat lebih mengeksplorasi potensi mengatasi masalah dengan menyusun program serta mengintegrasikannya dengan kota sebagai potensi/peleuang mengatasi masalah.</p>	<p>mendukung untuk potensi keberlanjutan suatu bank sampah merujuk pada pentingnya peran serta masyarakat. Bank Sampah Kasih memiliki bentuk partisipasi yang lebih beragam dan lebih besar ketimbang Bank Sampah Gemah Ripah. Pada Bank Sampah Gemah Ripah memang terjadi perubahan dalam bidang lingkungan dimana masyarakat tidak lagi melakukan penanggulangan sampah dengan cara yang tidak baik untuk lingkungan akan tetapi perubahan dalam segi peningkatan kesadaran dan kebersihan lingkungan lebih dirasakan pada Bank Sampah Kasih.</p>
PERSAMAAN PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti mengenai program sampah berbasis komunitas. 2. Menggunakan metode kualitatif action research. 3. Bertujuan untuk kemandirian masyarakat dalam mempertahankan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian Participatory Action Research (PAR). 2. Posisi peneliti berperan sebagai Fasilitator yang mendampingi pada proses perencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. 2. Metode partisipasi digunakan untuk melihat dampak dari perubahan masyarakat.
PERBEDAAN PENELITIAN	<p>Penelitian masuk ke ranah kesejahteraan sosial masyarakat.</p>	<p>Penelitian membahas mengenai pengentasan kemiskinan pada pemukiman kumuh perkotaan, penelitian fokus pada konsep model pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Penelitian masuk ke ranah sosiologi dan fokus pada perbedaan bank sampah di dua lokasi yang berbeda.</p>

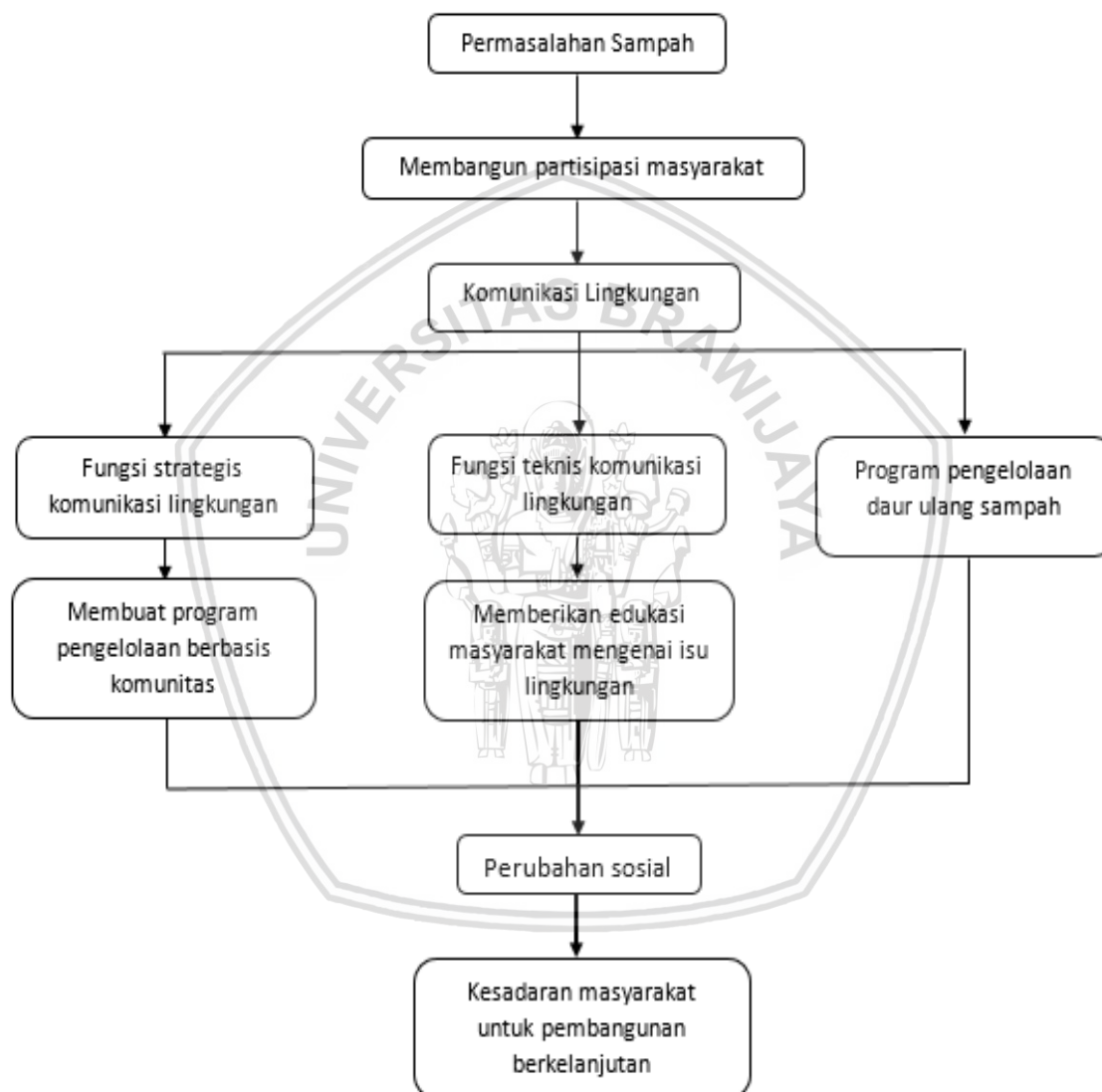
Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2018)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan data dan fenomena yang peneliti telah dapatkan, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berangkat dari fenomena permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Sunter Agung, terutama di wilayah RW 03 dan RW 06. Peneliti melakukan pengidentifikasian masalah melalui observasi, wawancara dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan warga setempat. Kemudian, dari temuan data yang dihasilkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan yang terjadi, salah satu faktor utamanya yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam persoalan sampah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berupaya membangun partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam mencapai tujuan untuk perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk mencapai upaya tersebut, peneliti menginisiasikan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah yang jika dikaitkan dengan kajian komunikasi lingkungan, hal tersebut akan memperbaiki permasalahan yang sedang terjadi dengan memenuhi dari fungsi komunikasi lingkungan, antara lain fungsi strategis dan fungsi teknis. Jika dijabarkan, kegiatan yang dilakukan pada fungsi strategis yaitu dengan pembuatan program pengelolaan berbasis komunitas. Kemudian fungsi teknisnya yaitu melalui kegiatan edukasi persoalan sampah. Selanjutnya, untuk memenuhi keinginan warga dalam pengelolaan sampah, diadakannya program daur ulang sampah. Sehingga dengan adanya program tersebut, diharapkan akan mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik dan

dapat diterapkan oleh warga RW 03 dan RW 06 Kelurahan Sunter Agung untuk mencapai kesadaran masyarakat dalam pembangunan secara berkelanjutan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2018)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menurut Soekanto (2001) merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan analisis dan model untuk dikembangkan oleh peneliti secara terstruktur yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian dengan hasil data deskriptif dalam bentuk tulisan dari suatu kata-kata atau pernyataan dari orang-orang dan suatu perilaku yang dapat dilihat (Bogdan dan Taylor, 1975; dalam Moleong, 2014). Penelitian kualitatif juga dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2014, h. 5) bahwa dalam penelitian ini menggunakan latar yang bersifat alamiah untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan berbagai metode. Pada penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang fleksibel, sehingga penelitian ini dapat berubah seiring dengan kondisi yang terjadi (Herdiansyah, 2010). Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan *grounded research*, dikarenakan penelitian ini tidak bergantung pada asumsi apapun. *Grounded research* membentuk teori melalui hasil observasi langsung yang dilakukan oleh Peneliti, bukan dengan teori yang sudah terbentuk sebelumnya (Adebayo, 2004; Widjajani, 2009). Dengan hasil lapangan yang membentuk data awal, yang diolah untuk menentukan variabel, dan teori yang menggabungkan antara variabel dengan data yang diperoleh (Babbie, 2004).

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang sifatnya pragmatis dan untuk menuju perubahan, karena dalam

penelitian terapan teori bukan sebuah tolok ukur dalam penelitian (Neuman, 2017). Secara langsung penelitian ini mengarah pada pemecahan masalah dan bukan untuk mengembangkan dari sebuah teori, sehingga rumusan penelitian ini tidak begitu kompleks (Stringer, 1999). Penelitian terapan dapat dikategorikan sebagai *action research*, dengan asumsi posisi subjek harus berpartisipasi secara langsung pada proses penelitian dan berdampak pada seluruh partisipan (Stringer, 1999).

Neuman (2017, h. 34) mengungkapkan bahwa *action research* menggunakan pengetahuan dalam bentuk kekuatan. Jenis penelitian ini menghasilkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Neuman juga mengatakan bahwa *action research* terdapat lima karakteristik, yaitu:

1. Subjek yang diteliti aktif dalam proses penelitian berusaha untuk menggabungkan pengetahuan yang baru dengan tingkat kepedulian masyarakat.
2. Penelitian mengkaji hubungan antara kekuatan dengan ketidakseimbangan pada ketidakadilan sosial
3. Hasil penelitian ditujukan untuk menyadarkan kepedulian dan memberdayakan masyarakat secara luas.
4. Penelitian berkaitan dengan suatu aksi sosial-politik untuk meraih tujuan sosial yang diharapkan

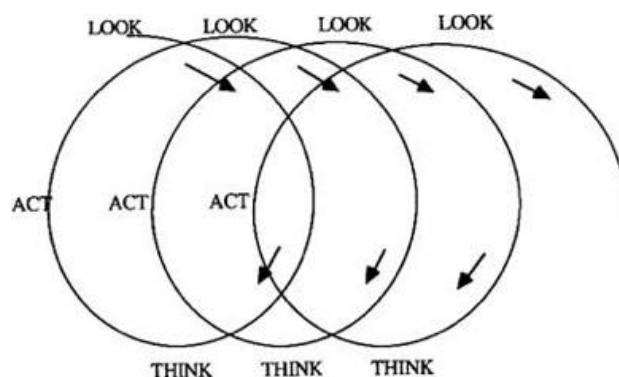
Pada *action research* terdapat jenis penelitian lain, yaitu *participation action research* (PAR) yang menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam penelitian

ini. Neuman (2017, h. 35) menyatakan bahwa dalam *participation action research* (PAR) membutuhkan peran aktif subjek yang diteliti untuk ikut dalam merumuskan, merancang, dan melaksanakan penelitian. Secara bersama-sama peneliti dan subjek membentuk rancangan program dengan proses kolaborasi. Peneliti berperan sebagai fasilitator yang turut membantu dalam merancang program, mengumpulkan data, serta menganalisis data yang telah dihasilkan.

3.2 Tahapan Proses Penelitian Tindakan Partisipatoris

Model penelitian yang mengarah pada tindak partisipatoris dirancang oleh Stringer (1996) dalam penelitian yang berbasis komunitas. Pada model ini terdapat kerangka dasar melalui suatu langkah-langkah antara lain *look* (melihat), *think* (berpikir), *act* (bertindak) (Yaumi & Damopolii, 2014). Langkah pertama *look* (melihat) dijelaskan bahwa hal ini mencakup kegiatan pengumpulan informasi secara relevan serta pendeskripsian keadaan. Langkah kedua, *Think* (berpikir) yang merupakan kegiatan dalam meneliti dan menganalisis sesuatu yang terjadi, untuk diinterpretasikan dan dijelaskan. Terakhir yaitu *Act* (bertindak) merupakan kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Model Stringer ini menunjukkan adanya model spiral interaktif yang berisi mengenai gabungan dari proses *look*, *think*, dan *act*. Proses ini hadir untuk menemukan suatu pencapaian hasil yang diharapkan dan berlangsung secara terus menerus (Yaumi & Damopolii, 2014). Apabila target belum tercapai dari apa yang diharapkan dan belum memperlihatkan hasil yang memadai, proses ini dapat diulang hingga hasilnya akan sinkron dengan standar penentuannya (Yaumi & Damopolii, 2014). Model spiral interaktif ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Spiral Penelitian Tindakan Partisipatori

Sumber: Stringer (1996)

Penerapan model Stringer dalam penelitian tindakan partisipatori pada program pengelolaan sampah berbasis komunitas di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung diharuskan untuk melewati tahapan sebagai berikut:

1. *Look*

Tahap ini Peneliti mengumpulkan data serta informasi, secara sekunder melalui studi literatur maupun membaca laporan yang sudah ada sebelumnya dan primer melalui interaksi tatap muka secara langsung dengan partisipan, membuat partisipan paham mengenai penelitian ini untuk menggambarkan suatu permasalahan yang ada. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti dengan RW 03 dan RW 06 Sunter Agung supaya menghadirkan rasa kekeluargaan dari warga dengan Peneliti, hal tersebut membuat Peneliti akan mudah dalam membuat komunitas mengenai program nantinya.

2. *Think*

Pada tahap ini mencoba untuk mendalami hingga menganalisa permasalahan yang terjadi, dan mendeskripsikan sebab dari

permasalahan tersebut. Pandangan melalui suatu pendapat menunjukkan adanya perbedaan penjelasan yang terjadi, persepsi yang berbeda dari berbagai pihak, dan adanya campur tangan orang yang tepat terhadap situasi tersebut (Denzin dalam Stringer, 1999, h. 90). Tahap ini terdapat dengan empat proses, yaitu memperdalam pemahaman dari partisipan mengenai permasalahan, mengelompokkan pihak terkait untuk memberikan pemahaman mengenai persoalan yang terjadi, menganalisis hasil yang diperuntukan bersama, dan melaporkan dari hasil proses tersebut kepada semua yang berkaitan dalam menangani permasalahan yang terjadi.

3. *Act*

Merupakan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap ini memiliki tujuan agar pihak terkait bersama-sama untuk merumuskan rencana dalam mengatasi masalah yang terjadi. Hingga nantinya Peneliti selaku fasilitator dan warga akan membuat rencana terkait program pengelolaan sampah serta komunitas yang akan dibuat untuk melaksanakan program tersebut.

3.3 Penentuan Partisipan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa kriteria terkait penentuan partisipan, antara lain:

1. Warga sekitar wilayah RW 03 dan 06 yang paham mengenai kondisi lingkungan Sunter Agung.
2. Warga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan di wilayah Sunter Agung.

3. Warga yang aktif bergabung dalam kelompok masyarakat di wilayah Sunter Agung.

Merujuk pada kriteria di atas, partisipan yang tepat untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian yaitu Perwakilan LMK (Lembaga Masyarakat Kota) Sunter Agung dari RW 03 dan RW 06, Ketua dan perwakilan anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Ketua dan pengurus dari RW 03 dan RW 06, Ketua dan perwakilan PKK dari RW 03 dan 06 Sunter Agung, dan Perwakilan Karang Taruna dari RW 03 dan 06 Sunter Agung. Jenis *sampling* yang digunakan pada penelitian yaitu teknik *purposive sampling* dalam memutuskan partisipan. Karena menurut Bungin (2010) untuk memilih informan pada penelitian kualitatif dilakukan dengan sengaja. Serta dalam teknik ini juga meliputi orang atau kelompok melalui tahap seleksi berdasarkan kriteria yang telah dibuat peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2014).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian sendiri merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan dilakukan sesuai dengan data secara objektif dalam menghasilkan jawaban serta pemahaman dari suatu permasalahan (Sekaran, 2003). Kemudian data dari penelitian menjadi begitu penting fungsinya, supaya penelitian dapat menelusuri masalah yang terdapat pada fenomena yang terjadi. Menurut Kaelan (2012) teknik pengumpulan data memiliki pengertian yaitu langkah penting dalam mengerjakan suatu penelitian, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data, kemudian peneliti dapat menganalisis data tersebut. apabila peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti tidak akan

memperoleh data yang sesuai seperti yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain data primer yang diambil langsung pada saat turun lapang dan data sekunder yang bersumber dari bahan bacaan (Nasution, 2006). Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini melibatkan langsung Peneliti untuk turun lapangan dalam mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony & Almanshur, 2012, h. 166). Dalam hal ini, Peneliti mengamati langsung lingkungan sekitar serta menghadiri kegiatan rapat rutin yang diadakan oleh pengurus RW dan PKK.

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Teknik pengumpulan data ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2010, h.108). Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mendalam secara tidak terstruktur dengan Lurah serta perwakilan dari forum dan masing-masing RW 03 dan RW 06 Sunter Agung, serta melalui diskusi kelompok dalam FGD “BISA FASTER” (Bincang Seputar Fasilitas Pengelolaan Sampah Sunter).

Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti juga dengan menggunakan data sekunder, yang meliputi:

1. Studi pustaka

Dalam studi pustaka merupakan data berupa kajian teoritis melalui referensi dan literatur yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma yang terdapat pada kondisi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan dalam metode ini yaitu dengan buku, jurnal, karangan ilmiah, skripsi, tesis, dan juga referensi lain yang menunjukkan mengenai sampah yang terdapat pada wilayah Sunter Agung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan meneliti dokumen yang terdapat pada suatu perusahaan (Narimawati, 2010). Penulis mengambil data melalui dokumen Profil Wilayah Sunter Agung yang diperoleh langsung dari Kelurahan Sunter Agung.

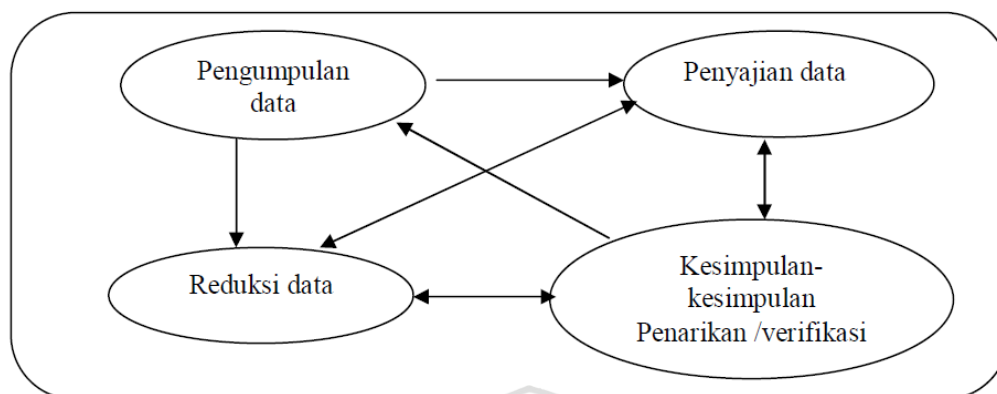
3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, dikarenakan model ini sudah cukup mendukung dalam menggali data yang didapatkan oleh peneliti. Data yang nantinya diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Miles dan Huberman menjelaskan dalam model ini terdapat empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan diakhir penelitian (dalam Herdiansyah, 2010). Tahapan pertama yaitu pengumpulan data, dalam tahap ini peneliti

menggabungkan data dari hasil *pra*-penelitian, proses penelitian, hingga pada akhir penelitian (Herdiansyah, 2010).

Tahap kedua, yaitu reduksi data dalam menggabungkan data yang didapatkan dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan (*script*) untuk dianalisis (Herdiansyah, 2010). Dengan begitu, dari hasil data observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan studi pustaka digabungkan ke dalam tulisan. Hasil dari wawancara dituangkan kedalam kata-kata, hasil observasi berbentuk lampiran, dan studi pustaka berbentuk *script* dari dokumen.

Pada tahap ketiga, proses *display* data dalam hal ini yaitu proses pengolahan data yang setengah jadi diseragamkan ke dalam tulisan dan memiliki alur tema yang tepat ke dalam suatu bagan kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang telah dikategorisasikan, serta nantinya hasil tersebut akan memecah tema untuk membentuk suatu yang lebih sederhana dengan subtema akhir menghasilkan *coding* sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan (Herdiansyah, 2010). Terakhir, yaitu tahap kesimpulan secara mendasar yang berisikan mengenai uraian dari hasil subkategorisasi tema yang terdapat pada tabel kategorisasi dan *coding* yang sudah dilakukan, diikuti dengan adanya *quote* hasil wawancaranya.



Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman
Sumber: Saldana (2014)

3.6 Goodness Criteria

Peneliti menggunakan goodness criteria dalam meningkatkan kualitas penelitian. Neuman (2017) menyatakan bahwa *goodness criteria* merupakan teknik dari pemeriksaan suatu keabsahan data yang terdiri dari:

a. *Credibility* (Kepercayaan)

Credibility gunanya untuk menentukan penelitian dengan kenyataan yang ada hingga dapat dipercaya (Creswell, 2010). Dengan begitu peneliti membuat kriteria yang tepat dalam menentukan informan yang kredibel dalam berpartisipasi untuk melakukan program pengelolaan sampah yang berbasis komunitas pada wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung.

b. *Transferbility* (Keteralihan)

Creswell (2010) menyatakan bahwa dalam hal ini *transferbility* memperlihatkan ketepatan hasil penelitian dapat diterapkan pada

subjek penelitian, sehingga dalam menyajikan data dari hasil penelitian harus bersifat terperinci, jelas dan dapat dipercaya.

c. *Dependability* (Konsistensi)

Dependability berhubungan dengan stabilitas dari peneliti dalam hal pengumpulan data, mengolah dan menganalisis konsep untuk menarik kesimpulan (Neuman, 2017). Dalam hal ini *dependability* juga menjelaskan mengenai akses dalam menilai seluruh tahapan penelitian, dengan memberikan hasil penelitian kepada partisipan untuk melihat penelitian tersebut apakah sudah memadai (Creswell, 2010).

d. *Confirmability* (Kepastian)

Neuman (2017) menjelaskan bahwa *Confirmability* memiliki fungsi untuk mengetahui kebenaran dari hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan. *Confirmability* juga bertujuan dalam memastikan kesesuaian dari hasil yang didapat telah benar sesuai dengan apa yang diperolehnya (Creswell, 2010).

3.7 Etika Penelitian

1. Peneliti memiliki izin untuk menyebutkan identitas lengkap informan pada laporan penelitian.
2. Peneliti memiliki izin untuk melakukan penggalan data dengan tidak ada unsur keterpaksaan baik dari segi waktu dan jawaban yang diberikan saat melakukan wawancara.

3. Peneliti tidak menyudutkan informan dalam memberikan pertanyaan dalam melakukan wawancara.
4. Penulisan hasil penelitian murni diperoleh dari penggalian data dengan hasil wawancara, observasi, dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan oleh informan.





BAB IV

HASIL

Pada hasil ini, peneliti akan memaparkan mengenai tahapan *Participatory Action Research* (PAR) yang dilakukan dalam beberapa siklus yang di dalamnya terbagi menjadi tiga, yaitu *look*, *think*, dan *act*. Kemudian penelitian ini memiliki tiga siklus. Pada **siklus pertama** dimulai dari tahapan *look*, peneliti menghimpun data dengan mengumpulkan berita terkait persoalan sampah di Sunter, melakukan observasi langsung ke wilayah Sunter Agung, dan wawancara langsung dengan pihak Kelurahan dan pengurus RW setempat. Berangkat dari hasil yang ditemukan dari data awal, peneliti masuk pada tahapan *think* untuk melakukan identifikasi dalam hasil permasalahan yang ada. Melalui wawancara dengan pihak Kelurahan dan warga setempat, ditemukan bahwa permasalahan sampah muncul karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakannya pemberian edukasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai narasumber dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan warga sekitar. Pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada tahapan *act* dalam siklus yang pertama.

Kemudian **siklus kedua**, pada tahapan *look* melihat dari kegiatan FGD yang dilakukan. Peneliti melihat terdapat perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan masyarakat mengenai persoalan sampah, serta peneliti juga mendapatkan adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah yang ada di sekitar wilayah mereka. Selain itu dari hasil yang ditemukan, terdapat potensi kelompok sadar yang dapat diberdayakan. Pada tahapan *think* di siklus kedua,

peneliti menginterpretasikannya dengan memfasilitasi kelompok-kelompok sadar untuk menuangkan pemikiran mereka pada sebuah dialog untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam membuat suatu program. Selanjutnya dari *think* tersebut, dibentuknya Komunitas Peduli Sampah yang di dalamnya terdiri dari tiap elemen kelompok masyarakat, dalam kegiatan ini merupakan tahapan *act* siklus kedua pada PAR yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan dialog yang telah dilakukan dari siklus kedua, peneliti melanjutkannya **siklus ketiga** dalam tahapan PAR dengan melihat (*look*) bahwa masyarakat dalam komunitas tersebut sudah mulai timbul kesadaran dan membutuhkan stimuli untuk segera melakukan kegiatan. Kemudian pada tahapan *think* di siklus ketiga ini merupakan kegiatan perencanaan program yang dilaksanakan Komunitas Peduli Sampah. Pada akhirnya program yang direncanakan merupakan kegiatan edukasi mengenai persoalan sampah dan program daur ulang sampah rumah tangga. Implementasi tahapan *act* pada siklus ketiga, dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Sampah Sunter dengan Komunitas *Green Generation*. Seusai kegiatan yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara untuk melihat respon warga terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Pada **siklus pertama** yang dilakukan peneliti dalam tahap *look* menghasilkan beberapa gambaran, di antaranya sebagai berikut:

4.1 Profil Kelurahan Sunter Agung

Bersumber dari data Profil Kelurahan Sunter Agung, yang diberikan oleh pihak Kelurahan, keadaan geografis wilayah Sunter Agung berada di bawah permukaan air laut $\pm 1-2$ meter dan memiliki luas wilayah sebesar 425 Ha. Dengan batas wilayah untuk bagian Utara adalah Jl. Raya RE Martadinata, bagian Timur adalah Jl. Sunter Permai, bagian Selatan, Jl. Danau Sunter Selatan, dan bagian Barat yaitu Kali Sentiong. Keadaan wilayah Sunter Agung sebelumnya merupakan rawa dan tanah sawah, hingga dengan berjalannya waktu kini wilayah Sunter Agung sudah mengalami perubahan dan semakin berkembang.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kelurahan Sunter Agung
Sumber: Profil Kelurahan Sunter Agung, 2016

Perubahan yang terjadi di Sunter Agung antara lain sarana dan prasarana dari segi ekonomi, sosial, umum, dll hingga perubahan penataan lingkungan. Sampai dengan bulan Desember 2016, jumlah penduduk yang berada di wilayah Sunter Agung berjumlah 85.516 jiwa yang terdiri dari penduduk WNI berjumlah 85.433 jiwa dan penduduk WNA 83 jiwa. Kemudian Kelurahan Sunter Agung memiliki 20 Rukun Warga (RW), 280 Rukun Tetangga (RT), dan 30.750 Kepala Keluarga (KK).

Penduduk yang berada di wilayah Kelurahan Sunter Agung bersifat heterogen, karena sebagian besar penduduk merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah dan berasal dari beragam suku, salah satunya Tionghoa. Dalam observasi yang telah dilakukan Peneliti, latar belakang masyarakat yang beragam tidak menghalangi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut didasari dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh masyarakat untuk dapat menghormati sesamanya.

Berdasarkan data Profil Kelurahan Sunter Agung, mayoritas penduduk di sana menjalani pendidikan akhir hingga Sekolah Menengah Atas/SLTA yang berjumlah 20.599 jiwa dan penduduk bermata pencaharian pegawai swasta, pegawai negeri dan ABRI mendominasi pada wilayah Sunter Agung. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Sekolah	4.985	4.289	9.274
2	Tidak Tamat SD	4.959	5.285	10.244
3	Tamat SD	7.783	6.912	14.695
4	Tamat SLTP	10.015	9.911	19.926
5	Tamat SLTA	10.525	10.074	20.599
6	Tamat Akademi/PT	5.037	5.338	10.375
7	Tidak Sekolah (Putus Sekolah)	4.903	3.841	8.744

Sumber: Profil Kelurahan Sunter Agung, 2016

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tani	-	-	-
2	Karyawan Swasta/ Pemerintahan/ABRI	18.879	14.626	33.505
3	Pedagang	5.137	9.205	14.342
4	Nelayan	-	-	-
5	Buruh Tani	-	-	-
6	Pensiunan	2.102	682	2.784
7	Pertukangan	3.182	-	3.182
8	Pengangguran	4.985	4.559	9.544
9	Fakir Miskin	2.923	2.625	5.547
10	Lain-Lain	5.919	1.053	6.972

Sumber: Profil Kelurahan Sunter Agung, 2016

Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian di wilayah Kelurahan Sunter Agung, yaitu RW 03 dan RW 06. Wilayah pertama yaitu RW 03, yang terdiri dari 17 RT dan 3.226 Kepala Keluarga. Keadaan sekitar pemukiman RW 03 dapat dikatakan cukup kumuh, dikarenakan jalan di wilayah tersebut terdiri dari gang-gang kecil yang hanya dapat dilalui oleh satu mobil dan juga jarak rumah antar rumah lainnya sangat rapat. Ruas jalan yang sempit dan cukup banyak gang, membuat wilayah tersebut sulit untuk dipahami dan membingungkan. Walaupun terdapat angkutan umum yang melintasi jalan raya Sunter Agung, wilayah ini terbilang sulit untuk dimasuki oleh angkutan umum yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai darurat sampah karena letaknya yang berdekatan dengan kali. Hal tersebut juga dapat berdampak bagi wilayah RW 03 apabila intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan air kali meluap hingga terjadi banjir.



Gambar 4.2 Pemukiman warga wilayah RW 03 Sunter Agung
Sumber: Dokumentai Peneliti (2018)



Gambar 4.3 Kali Sunter berdekatan dengan wilayah RW 03 Sunter Agung
Sumber: Dokumentai Peneliti (2018)

Wilayah kedua yaitu RW 06, yang terdiri atas 15 RT dan 2.441 Kepala Keluarga. Jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan dari RW 03, wilayah RW 06 terbilang sudah cukup baik. Didukung dengan ruas jalan yang cukup luas dan penataan wilayah yang cukup rapi. Sebagian jalan-jalan sekitar RW 06 dihiasi dengan pohon-pohon yang rindang sehingga tidak menjadikan wilayah ini terlihat gersang. Selain itu, untuk persoalan sampah pada RW 06 sudah tertata dengan adanya pembedaan tempat sampah untuk jenis sampah organik dan non-organik.



Gambar 4.4 Pemukiman wilayah RW 06 Sunter Agung
Sumber: Dokumentai Peneliti (2018)



Gambar 4.5 Pembedaan tempat sampah di wilayah RW 06 Sunter Agung
Sumber: Dokumentai Peneliti (2018)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antar warga Kelurahan Sunter Agung berjalan cukup baik dan melihatkan sisi kekeluargaan antar warga lainnya. Dengan adanya berbagai lembaga organisasi sosial di wilayah penelitian baik yang sifatnya lembaga formal, informal dan sosial menjadikan warga berbaaur satu sama lain. Lembaga tersebut antara lain RW, RT, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PKK, Jumantik dan Karang Taruna. Selain itu juga terdapat lembaga yang bersifat keagamaan berupa majelis ta'lim, yayasan sosial yang terdiri dari 13 lembaga dan

juga lembaga yang berkegiatan dalam hal kekeluargaan hingga kesehatan. Walaupun sebagian warga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, hal ini tidak mempengaruhi kegiatan bersosialisasi dalam bermasyarakat. Dari hasil observasi yang dilakukan Peneliti, warga sekitar cukup aktif dalam pelaksanaan kegiatan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait. Kemudian dalam persoalan kebersihan di wilayah ini cukup baik, dikarenakan terdapat kegiatan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) yang mempertemukan warga tiap minggunya untuk melakukan kerja bakti dalam mencegah adanya bencana banjir yang sering terjadi di lingkungan Sunter Agung. Pelaksanaan kerja bakti nantinya langsung dilaporkan kepada Walikota Administrasi Jakarta Utara melalui tembusan dari Kasudin Kebersihan dan Camat Tanjung Priok.

4.2 Sunter dan Persoalan Sampah

Sebelum peneliti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan *Participatory Action Research* (PAR), peneliti melakukan pengumpulan data terkait persoalan sampah yang terjadi di Sunter melalui berita di beberapa portal online, khususnya portal online beritajakarta.id dikarenakan portal tersebut media milik pemerintah. Pada berita tersebut dituliskan wilayah Sunter Agung, khususnya RW 03 memiliki saluran penghubung yang tidak berfungsi dikarenakan sampah yang menumpuk (beritajakarta.id, 2015). Dalam berita lain, warga RW 03 Sunter Agung juga mengatakan jika sampah di Jalan RE Martadinata Sunter Agung banyak dikeluhkan karena mengganggu jalur keluar masuk di wilayah RW 03 yang dijadikan penampungan sampah sementara (beritajakarta.id, 2017).

Berangkat dari data yang telah didapat, peneliti mendatangi Kelurahan Sunter Agung untuk melakukan observasi dan wawancara secara langsung, peneliti bertemu dengan Andi Dirham selaku Lurah Sunter Agung dan melakukan perbincangan mengenai sampah sekitar Sunter Agung dan membahas mengenai lokasi yang akan dijadikan penelitian.

“RW 3 sama RW 7. Mereka masih satu wilayah, berdekatan, RW 03 posisinya ada di seberang kali yang dekat dengan wilayah sekitar.”
(Pernyataan dari Pak Andi Dirham, selaku Lurah Kelurahan Sunter Agung dalam wawancara dengan Peneliti, pada tanggal 7 Desember 2017)

Pada wawancara dengan Lurah Sunter Agung, ia mengungkapkan jika masyarakat selama ini menganggap TPST yang terdapat di wilayah Sunter Agung merupakan tempat pembuangan umum, padahal fungsi TPST tersebut merupakan tempat pembuangan akhir dari berbagai wilayah di Jakarta. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat sampai sekarang belum paham mengenai persoalan sampah sekitar serta fungsi tempat pembuangan sampah yang ada.

“Selama ini saya tahu masyarakat, ya itu kan di sana masih belum, karena itu pengepakan pres, malah sampah yang dari TPS-TPS di luar malah di bawa ke situ, untuk di pres. Ya bukan masyarakat langsung, gitu. Jadi menurut saya ya masyarakat, ya walaupun Cuma sini aja ada TPS, tapi karena mungkin tidak. masyarakat itu dikit-dikit ada pembuangan sampah udah enak, padahal ya bukan, itu buat ngepak.”
(Pernyataan dari Pak Andi Dirham, selaku Lurah Kelurahan Sunter Agung dalam wawancara dengan Peneliti, pada tanggal 7 Desember 2017)

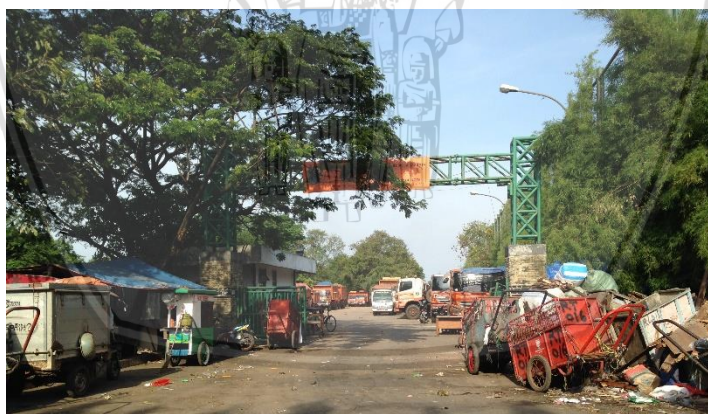
Kemudian peneliti langsung melakukan observasi ke masing-masing wilayah yang dituju dan bertemu dengan ketua RW untuk permohonan izin penelitian di wilayah tersebut. Agar lebih mengenal dengan warga sekitar, peneliti juga mengikuti kegiatan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan oleh RW 03 dan RW 06.

4.3 Gambaran Umum Persoalan Sampah Sunter

Menurut Profil Kelurahan Sunter Agung pada tahun 2016 jumlah sampah yang dihasilkan perhari di wilayah Sunter Agung sebesar 49,9 m³, jumlah ini sudah setara dengan sampah yang terangkut perharinya. Sampah yang mendominasi di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung, yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga. Dengan begitu, warga selama ini warga sendiri merupakan penghasil sampah terbanyak di lingkungan sekitar mereka. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri atas sampah organik, non-organik, dan sampah spesifik. Sampah organik merupakan hasil olahan manusia atau yang berasal dari alam. Biasanya sampah ini berupa sisa-sisa makanan, sayur, buah, daun dll yang tidak dapat diolah kembali dan hanya terurai begitu saja. Berbeda dengan sampah organik, sampah non-organik merupakan jenis sampah yang berasal dari hasil olahan pabrik maupun hasil dari industri lainnya. Sampah non organik terdiri dari besi, kaca, plastik, kaleng, dll, jenis sampah ini dapat dipergunakan kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian sampah spesifik merupakan sampah sisa hasil manusia yang terdiri atas pembalut, baterai, minyak wangi, obat-obatan, *hairspray*, dll, jenis sampah ini sangat berpengaruh bagi pemanasan global.

Pengelolaan sampah yang terdapat di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung selama ini diatur oleh lembaga dari masing-masing RT, sistem ini menjadi sesuatu yang normal dilakukan mengingat dalam satu RW terdiri dari beberapa RT yang menampung banyak keluarga di dalamnya. Untuk pengelolaan sampah, di tiap RT terdapat petugas kebersihan yang akan mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, kemudian merekalah yang membawa sampah ke TPS terdekat. Petugas

kebersihan dikerahkan langsung dari pihak Kelurahan terkait dengan kebersihan wilayah Sunter Agung yang bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan RW dan kemudian disalurkan kepada masing-masing RT yang terdapat pada wilayah RW tersebut. Sarana dan prasarana yang disediakan berupa tong petugas kebersihan, gerobak sampah, tong sampah dan juga lahan untuk pembuangan sampah. Kemudian dari pihak RW menyalurkan apa yang disampaikan oleh Kelurahan kepada masing-masing pengurus RT setempat yang memiliki tugas untuk memberi fasilitas terhadap sistem pembiayaan yang disediakan untuk para petugas kebersihan sebagai upah kerja mereka. Sehingga pengelolaan yang terdapat di wilayah RW 03 dan RW 06 dilakukan langsung oleh Petugas kebersihan yang ada.



Gambar 4.6 Kondisi sampah di TPST Sunter Agung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017

Pemilahan sampah tidaklah dilakukan langsung oleh warga saat membuang sampah hasil rumah tangga mereka, akan tetapi pemilahan sampah dilakukan langsung oleh petugas kebersihan setelah mengambil dari masing-masing wilayah. Hal tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh, karena petugas hanya memisahkan sampah yang sekiranya masih bisa diolah kembali untuk dijadikan barang yang

bermanfaat dan memiliki suatu nilai jual. Selain sampah yang masih bisa dipergunakan, sampah yang tidak terpakai disatukan dengan sampah lainnya hingga seringkali menumpuk sebelum dibawa ke TPST.

Penyelesaian masalah sampah yang ditangani oleh petugas kebersihan tidak menjadi jaminan untuk menjadikan lingkungan bebas dari sampah. Warga sekitar banyak yang mengusulkan mengenai pengelolaan yang berupa aksi nyata sehingga pengurangan sampah nantinya akan terlihat langsung. Pengadaan alat-alat yang datang dari Dinas Kebersihan melalui Kelurahan seperti gerobak sampah bukan jalan keluar yang tepat dalam mengatasi persoalan sampah secara menyeluruh. Kemudian dari hasil yang diperoleh peneliti dengan warga RW 03 dan RW 06, didapatkan bahwa sebagian besar warga masih belum memahami perbedaan sampah organik dan non organik, sehingga selama ini warga menganggap itu sudah ada yang mengaturnya. Hal tersebut yang menyebabkan warga merasa kurang peduli dengan sampah di sekitarnya dan cenderung mengandalkan pemulung untuk mengambil sampah. Selama ini hanya sebagian warga yang peduli dan dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah ketempat yang telah disediakan, akan tetapi masyarakat belum melakukan pemilahan sampah menurut jenisnya.

Pendapat juga disampaikan oleh Sekretaris Lurah Sunter Agung, ia mengatakan bahwa sampah akan bermanfaat bagi warga sekitar dan memiliki nilai. Dengan adanya pemberdayaan sampah nantinya, diharapkan tidak ada masalah bagi warga Sunter Agung. Sampah yang diolah melalui daur ulang nanti, hasilnya akan kembali lagi pada warga sekitar. Selain memiliki nilai ekonomis, jenis sampah organik yang didaur ulang dapat menjadi pupuk kompos, nantinya pupuk tersebut

yang akan digunakan lagi untuk warga dalam memelihara tanaman yang terdapat di wilayah sekitar RW 03 dan RW 06 Sunter Agung. Persoalan sampah yang dihadapi akan terselesaikan jika pada tiap elemen masyarakat mampu bekerja sama dengan baik dalam memelihara lingkungan.

“Sampah juga akan bisa menjadi nilai yang ekonomis, bukan hanya numpuk aja. bagaimana mengolah sampah ini menjadi hal-hal yang bisa bernilai ya kan. Karena itu semata-mata termasuk untuk pembangunan masyarakat di wilayah Kelurahan Sunter Agung ini. Bernilai itu bukan harus bentuk langsung uang ya kan. Tetapi akan menciptakan inovasi-inovasi yang lain.” (Tanggapan yang diutarakan oleh Bu Sofiatun selaku Sekretaris Kelurahan Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018)

Melalui pembacaan data awal tersebut, peneliti melakukan tahapan kedua, yaitu *think* yang dipaparkan dari hasil persoalan sampah Sunter Agung oleh pihak Kelurahan. Berangkat dari hasil permasalahan yang telah dijabarkan, maka diinisiasikan untuk diadakannya edukasi mengenai pengelolaan sampah dengan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dan melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di dalamnya. Kegiatan tersebut merupakan tahapan *act* pada siklus pertama. Dalam melakukan FGD, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan masyarakat terkait persoalan sampah. Pelaksanaan FGD juga merupakan tahap identifikasi permasalahan lingkungan yang ada di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung. Sehingga hasil dari kegiatan FGD dapat diimplementasikan oleh peneliti dan juga masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah.

Pelaksanaan FGD juga merupakan tindak lanjut dari **siklus kedua** dari tahap *look* dalam penelitian PAR yang dilakukan. Dengan kegiatan FGD, didapatkan hasil sebagai berikut:

4.3.1 Perbedaan Pandangan antara Pihak Pemerintah & Masyarakat tentang Permasalahan Sampah

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti melalui observasi lapangan dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan warga RW 03 dan RW 06 Sunter Agung serta pihak Kelurahan Sunter Agung yang turut dihadiri oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, peneliti mendapatkan adanya perbedaan pandangan dari pihak masyarakat dan pihak Pemerintah mengenai permasalahan sampah. Hal tersebut nampak dari pengetahuan ibu-ibu PKK RW 03 dan pihak Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sunter Agung mengenai persoalan sampah. Pada rapat pertemuan PKK RW 03, salah satu dari perwakilan kader ibu-ibu PKK mengatakan bahwa diperlukan adanya persamaan persepsi, karena selama ini ibu-ibu dirasa masih minim pengetahuannya terkait sampah. Berbeda dari pihak FKDM selaku perwakilan pemangku kepentingan wilayah Sunter Agung, ia cenderung menginginkan adanya pengelolaan sampah secara fisik seperti yang pernah diimplementasikan, hal tersebut menandakan bahwa sebagai pemangku kepentingan dari pihak Kelurahan Sunter Agung, pengetahuannya terkait sampah sangat luas dan cukup berpengalaman dalam bidang pengelolaan sampah.

“Sekarang kalo menurut saya setuju ngga, kita samain dulu pemahaman kita apa sih sampah organik, apa sih non-organik. Kemudian mungkin pengelolaannya nanti seperti apa. Setuju ngga seperti itu dulu Bu? Jadi dari yang dasar aja dulu.” (Aspirasi yang

diutarakan oleh Bu Ana selaku Ketua PKK RW 03 Sunter Agung dalam rapat rutin PKK RW 03 Sunter Agung, pada tanggal 6 Januari 2018).

“Dulu zaman saya tiap 2 atau 3 rumah ada yang namanya kompos, semua harus punya kompos. Sampai Menteri Lingkungan Hidup membuat bank sampah kompos di wilayah saya. Saking pedulinya luar biasa. Yang namanya bungkus plastik dibuat tas, sekarang udah hilang semua tinggal masa lalu.” (Aspirasi yang diutarakan oleh Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018).



Gambar 4.7 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin RW 06 Sunter Agung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Kemudian perbedaan pandangan juga tampak dari sisi warga yang ingin permasalahan diatasi dengan sesuatu yang lebih terlihat atau berupa fisik, yaitu berupa pengadaan fasilitas alat kebersihan serta menambah petugas dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi. Sehingga permasalahan sampah di wilayah mereka setidaknya dapat teratasi dengan baik jika dilakukan penambahan petugas dan pengangkutan sampah secara rutin, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar.

“Saya sebagai pengurus RW juga menyarankan, kalo pak RT mengusulkan yang real-real saja, terutama fisik. Biasanya kalo usulan non fisik yang macem-macem, itu biasanya ngikut ya pak. Gerobak gitu

ngikut, saya kira fisik itu yang lebih penting.” (Pendapat yang diutarakan oleh Pak Agus selaku Ketua RW 06 Sunter Agung dalam rapat rutin RW 06, pada 9 Januari 2018)

“Karena yang buat kita warga khususnya, yang penting di tempat kita itu bersih sampah itu aja. Kita pengen itu petugas sampah yang ada di kita minimal itu setiap hari bisa angkut. Kalau bisa Sabtu Minggu atau juga di hari libur mohon diadakan pengangkutan sampah.” (Pendapat yang diutarakan oleh Pak Zainal Abidin warga RW 03 Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018)

Permasalahan sampah yang dihadapi oleh warga sekitar Sunter Agung khususnya RW 03 dan RW 06 juga terdapat perbedaan pandangan dengan pihak Pemerintah, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup DKI beranggapan bahwa selama ini Pemerintah telah membuat pengelolaan sampah yang menurutnya cukup ideal bagi warga sekitar. Akan tetapi berbeda dengan pandangan dari pihak warga sendiri yang mengalami langsung permasalahan sampah tersebut. Warga beranggapan bahwa pengelolaan sampah yang terdapat di wilayah Sunter Agung masih belum dirasakan dan belum cukup ideal bagi warga sekitar.

“Kita Dinas Lingkungan Hidup bekerja 24 jam 7 kali seminggu Pak. Makanya kita selalu stand by untuk membantu penanganan sampah di semua titik di DKI Jakarta. Kita berusaha untuk cepat, kita juga berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat.” (Pendapat yang diutarakan oleh Pak Fahmi selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018)

“Kepala daerah silih berganti, program semacam itu seringkali dilakukan, mulai di tingkat Kelurahan juga seringkali. Sampai-sampai setiap RW diberikan alat pengolahan sampah kompos, namun jarang sekali difungsikan. Implementasi masyarakat sampai saat ini betapa sulitnya. Sebenarnya, kami ini sasaran utamanya untuk apa begitu. Nah solusinya kedepan gimana supaya masyarakat juga tergerak hatinya

untuk menunjang program pemerintah yang tujuannya untuk mereduksi sampah ini.” (Pendapat yang diutarakan oleh Pak Adhar warga RW 03 Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada tanggal 21 Januari 2018)

Pernyataan di atas menandakan bahwa terdapat perbedaan perilaku serta pemahaman seseorang dalam suatu kebijakan yang akan semakin sulit untuk diimplementasikan ke depannya. Hal tersebut ditandai dengan perbedaan pendapat dari pihak yang satu dan pihak lainnya. Berbeda apabila masyarakat memiliki satu pandangan yang sama mengenai sampah, maka dalam merancang dan melakukan program nantinya akan lebih mudah. Melihat permasalahan tersebut, peneliti mendeteksi terdapat potensi yang sebenarnya masih bisa dibangun lagi dari kelompok-kelompok sadar akan masalah lingkungan yang sudah terbentuk di wilayah Sunter Agung, akan tetapi dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, mereka masih belum diberdayakan. Maka dalam menindak lanjuti adanya perbedaan pandangan tersebut, pada tahapan *think* di siklus PAR kedua ini peneliti mengimplementasikannya dengan membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat tiap elemen kelompok masyarakat agar dari masing-masing pihak dapat menuangkan pemikiran mereka untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam membuat suatu program.

4.3.2 Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Terkait Penyelesaian Masalah Sampah

Berdasarkan gambaran dan juga pandangan mengenai permasalahan sampah di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung melalui hasil observasi dan FGD yang telah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat sekitar membutuhkan adanya suatu

penyelesaian dalam permasalahan sampah. Pada saat Peneliti melakukan observasi dengan menghadiri rapat rutin yang dilaksanakan oleh RW sekitar, dari rapat RW tersebut Peneliti memberi stimulasi pada warga untuk membicarakan permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka.



Gambar 4.8 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin PKK RW 03 Sunter Agung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Dari hasil rapat rutin RW 03 yang dihadiri Peneliti dan juga pendapat dari warga dalam kegiatan FGD, didapatkan bahwa warga RW 03 membutuhkan adanya edukasi berupa sosialisasi mengenai sampah secara umum dikarenakan selama ini masyarakat belum ada penjelasan lebih lanjut. Serta warga juga meminta agar penambahan sumber daya manusia dalam bentuk petugas kebersihan ditambah, agar sampah di wilayah RW 03 dapat diangkut setiap hari dan tidak terjadi penumpukan sampah hingga berdampak ke lain hal.

“Kalo misalkan menurut saya baiknya sebelum ada pelaksanaan ini, di sosialisasikan dulu sampah tuh seperti apa, dibuat seperti apa, ketika ada sampah apa yang harus dikerjakan, pengolahan sampah seperti apa. saya minta sama teman-teman para mahasiswa diberikan pencerahan agar secara mendalam bagaimana cara pemilahan sampah yang benar dan cara pengolahan seperti apa, cara penggolongan seperti apa, masyarakat itu sebetulnya bukan ngga mau tau mba, ngga ada penjelasan.” (Pernyataan dari Pak Pak Zainal selaku

Ketua RT 17 RW 3 Sunter Agung dalam rapat rutin Bapak-Bapak RW 03, pada 3 Januari 2018).

“Sekarang kalo menurut saya setuju ngga, kita samain dulu pemahaman kita apa sih sampah organik, apa sih non-organik. Kemudian mungkin pengelolaannya nanti seperti apa. Setuju ngga seperti itu dulu bu? Jadi dari yang dasar aja dulu. Ini kita semuanya rata-rata ibu-ibu rumah tangga, jadi bahasannya juga mungkin lebih baik bahasa yang lebih membumi yang kita mengerti ya? Seperti itu, mungkin itu dulu dijelasin.” (Pertanyaan Bu Ana selaku Ketua PKK RW 3 Sunter Agung kepada warga dalam rapat rutin Ibu-Ibu PKK RW 03, pada 6 Januari 2018).

“Agak kurang, kadang-kadang sampe bau belum dateng ya (petugas kebersihan), kadang sampe berapa hari. Tapi kalo gini-gini mah banyak yang mungut tukang pulung, jadi duit. Jadi kita udah agak ayem lah. Ya kan tukang sampahnya juga ngga tiap-tiap hari kan, dibagi-bagi waktu. Kalo tiap hari kan mungkin ga bisa dia, ada bagian sana bagian sini. Udah bagus (pihak Pemerintah dalam mengatasi sampah), kadang-kadang cuma masih agak numpuk gitu (sampah).” (Pernyataan Bu Jumiati selaku Warga RW 03 Sunter Agung dalam rapat rutin Ibu-ibu PKK RW 03, pada 6 Januari 2018).

“Karena sebetulnya permasalahan sampah ini kan kompleks Pak. Seharusnya setiap hasil permasalahan sampah itu tergantung dari situasi kondisi itu. Kita pengen itu petugas sampah yang ada di kita minimal itu setiap hari bisa angkut. Karena yang kita tahu dari Bu Seklur sendiri sampah nggak bisa kebuang, itu pasti numpuk Pak.” (Pernyataan dari Pak Zainal Warga RW 03 Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018)



Gambar 4.9 Peneliti Menghadiri Rapat Rutin RW 03 Sunter Agung

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Melalui kegiatan FGD yang telah dilakukan, sampai pada saat ini sampah di sekitar wilayah Sunter Agung sudah mulai mengganggu masyarakat sekitar dengan bau yang dihasilkan. Hal tersebut dikatakan oleh Pak Agus selaku Ketua RW 06 Sunter Agung, bahwa wilayahnya memiliki dampak besar dari sampah yang berada TPST, sehingga Pak Agus menginginkan adanya tindak lanjut dari Pemerintah dalam kepastian pembangunan TPST yang direncanakan agar segera terlaksana supaya tidak terjadi penumpukan sampah.

“Selama ini khususnya kan wilayahnya RW 06 Pak, wilayah saya. Dan kita selama ini menanggung resikonya atas keberadaan TPS itu. Karena apa, ini baunya luar biasa. Yang tadi disampaikan semoga cepat terealisasi. kebetulan RW 07, RW 03, RW 01 tuh sekarang ini itu pembuangannya sampah dipoolkan disitu. Tapi itu diluar dari kepengurusan dari pembuangan sampah tersebut. Karena semua itu merugikan RW 06, karena gerobak-gerobaknya sampai di wilayah kami. Seharusnya itu dikelola oleh RW masing-masing.” (Pernyataan dari Pak Agus selaku Ketua RW 06 Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER, pada 21 Januari 2018)

Peneliti juga mendapatkan adanya kebutuhan warga yang berkaitan dengan adanya pengelolaan sampah yang berawal dari warga itu sendiri dengan mendaur ulang sampah organik maupun non-organik untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Sofiatun selaku Sekretaris Lurah Sunter Agung dan juga Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung yang menginginkan program daur ulang yang pada saat itu pernah beliau terapkan di wilayahnya, di hadirkan kembali menjadi program jangka panjang yang dilakukan oleh tiap wilayah Sunter Agung.

“Karena yang memproduksi sampah paling tinggi Ibu-Ibu. Hari libur ataupun hari kerja tetep aja ke pasar ya kan. Giliran buang sampahnya hanya hari minggu ya kan, jadi masalah. Tetapi dengan nanti mengatur bagaimana diberikan tips-tips atau langkah-langkah memanajemen

sampah. Jadi sampah juga akan bisa menjadi nilai yang ekonomis, bukan hanya numpuk aja.” (Pernyataan Bu Sofiatun selaku Sekretaris Lurah Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018).

“Masyarakat harus punya peran serta, salah satu contoh sederhana Pak jadi kalo saya dan istri saya ke pasar, saya nggak boleh plastik, harus dari rumah bawa plastik sendiri. Kalau Bapak nggak percaya, saya di rumah ada 2 karung besar itu ada yang namanya botol aqua lumayan Pak dijual buat beli cabai. Terus ada yang namanya sampah yang bisa dibikin kompos, jadi dipisah-pisahkan walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, artinya pemilah-milah tadi tidak terlalu banyak, tetapi minimal sudah mengurangi sampah, pengalaman saya seperti itu. Yang kedua, pengalaman saya jadi setiap RT itu saya punya dulu namanya koordinator RT tentang sampah kebanyakan Ibu-Ibu. Ibu-Ibu jumatik muter supaya memberitahu kepada warga masyarakat sejak dini tidak diperbolehkan buang sampah sembarangan sehingga semua warga di sekitar kita membuang sampahnya adalah pada tempat yang sudah disediakan.” (Pernyataan dari Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018).

Pak Kasiman juga mengungkapkan jika pengadaan fasilitas diberikan berapapun jumlahnya tidak akan mengatasi permasalahan lingkungan, faktor utama dalam persoalan ini sesungguhnya adalah warga, mereka yang membuang sampah sembarangan dan mereka sendiri yang mempermasalahkan tentang keberadaan sampah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika budaya bangsanya atau cara pandang orang-orangnya tidak diubah, maka permasalahan sampah akan terus terjadi. Kebutuhan untuk mengatasi hal ini tidak hanya yang sifatnya fisik saja, akan tetapi juga berupa *mindset* masing-masing individu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena dengan cara pandang yang berbeda akan menjadikan masyarakat sadar dengan apa yang harus mereka lakukan.

“Menurut saya Sunter Agung mau dikasih gerobak motor 10 sekalipun tidak akan mampu mengatasi sampah, ini pengalaman saya.

Contohnya, Pak Ketua Kota Sehat juga ntar paham di jembatan ini ada sampah numpuk, mau diangkut saya nggak boleh Pak. Kenapa saya nggak boleh, karena memang batu. Orang-orang yang buang sampah ini batu. Orang tempat umum ditempatin sampah. Akhirnya begitu numpuk hujan warga sekitar protes, yang protes kepada orang-orang yang buang sampah. Intinya sampah ini seperti apa pun akan dibicarakan tidak akan selesai kalau budaya bangsa ini tidak dirubah.” (Pernyataan dari Pak Kasiman selaku Ketua FKDM Sunter Agung dalam FGD “BISA FASTER”, pada 21 Januari 2018)

Berdasarkan pemaparan mengenai kebutuhan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat membutuhkan adanya edukasi dalam pemilahan sampah sebagai tahap awal sebelum adanya program lebih lanjut, kemudian masyarakat membutuhkan kesiapsiagaan para petugas kebersihan untuk segera mengangkut sampah agar tidak menumpuk dan menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar, serta dalam mengatasi persoalan sampah Ketua FKDM mewakili masyarakat mengatakan bahwa wilayah ini membutuhkan adanya program daur ulang sampah yang memadai bagi masyarakat dengan menghidupkan kembali program yang sebelumnya sudah pernah dilakukan.

Sehingga dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang telah diutarakan, masyarakat sekitar masih cenderung bergantung pada Pemerintah. Untuk mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah, dengan begitu peneliti sebagai *expert* berusaha untuk mengimplementasikan pengadaan komunitas dan kelompok. Kemudian masih dalam siklus kedua dari tahapan PAR, kegiatan ini masuk pada tahapan *think* yang dilakukan oleh peneliti melalui dialog langsung dengan masyarakat dan juga pihak terkait arah program selanjutnya dalam mengatasi permasalahan sampah. Perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu edukasi, akan tetapi pemberian edukasi ini bukan sekedar

pemahaman teknologi, melainkan juga dari segi praktis. Harapannya program yang berjalan nanti tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi peneliti juga harus memastikan bahwa program tersebut dapat diterapkan pada masyarakat dan menjadikan program yang berjalan dalam jangka panjang. Selanjutnya berangkat dari tahap *think* pada siklus kedua, masih pada dialog yang dilakukan, peneliti memfasilitasi masyarakat dengan membentuk adanya komunitas yang di dalamnya terdiri dari tiap elemen kelompok masyarakat. Pengadaan komunitas tersebut masuk pada tahapan *act* siklus kedua dalam PAR yang dilakukan oleh peneliti.

4.3.3 Inisiasi Pembentukan Komunitas Peduli Sampah

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dalam menggabungkan kelompok masyarakat yang ada, peneliti membentuk komunitas untuk saling bekerjasama dalam hal pengelolaan dan pengembangan sampah lebih lanjut. Dalam pembentukan komunitas, diadakannya dialog yang dilaksanakan peneliti untuk merumuskan program. Dialog dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2018 di Sekretariat RW 06 Sunter Agung yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kelompok masyarakat, antara lain Pak Kasiman selaku Ketua FKDM, Pak Iwan selaku Ketua LMK RW 06, Pak Adha selaku Ketua LMK RW 03, perwakilan ibu-ibu PKK RW 03 yang diwakilkan oleh Bu Yayat dan Bu Irma, dan perwakilan ibu-ibu PKK RW 06 yang diwakilkan Bu Daroyah, Bu Susi, dan Bu Veronika. Terkait dengan pembentukan komunitas peduli sampah, Pak Kasiman selaku Ketua FKDM dipilih untuk menjadi koordinator dikarenakan pengalaman beliau mengenai sampah, khususnya kompos. Kemudian peneliti mengadakan dialog bersama membahas mengenai perbedaan pandangan dari pihak pemangku kepentingan dan

masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti dengan merencanakan program. Melalui dialog tersebut, peneliti menemukan bahwa keinginan masyarakat untuk mengolah sampahnya secara mandiri. Kemudian Ketua FKDM menyarankan adanya pelatihan edukasi terkait sampah dan pengomposan, seluruh anggota kelompok setuju dengan keputusan tersebut karena dapat menambah ilmu dan juga bermanfaat. Peneliti selaku pendamping menyarankan untuk melibatkan komunitas luar yang sudah *expert* dalam bidang lingkungan, khususnya sampah untuk menjadi pemateri dan memberikan pelatihan pada program selanjutnya. Seluruh anggota yang hadir saat itu sepakat dengan saran peneliti untuk menghadirkan komunitas luar.

Kemudian dari tahapan *act* tersebut, peneliti melakukan tahapan *look* yang masuk pada **siklus ketiga** dalam PAR. Terlihat bahwa pada *act* yang telah dilakukan pada siklus kedua, masyarakat sudah mulai timbul kesadaran dan mereka membutuhkan stimuli untuk segera melakukan kegiatan yang bersifat praktis. Peneliti sebagai fasilitator hanya berupaya untuk menstimuli masyarakat dan melakukan pencarian komunitas untuk diajak bekerjasama pada program yang akan dilaksanakan agar dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan begitu, tahap *think* pada siklus ketiga ini merupakan kegiatan perencanaan program yang dilaksanakan oleh pihak komunitas dan warga lainnya.

4.3.4 Rencana Program oleh Komunitas

Setelah melakukan dialog dengan Komunitas Peduli Sampah, peneliti melakukan pencarian komunitas yang bergerak dalam hal lingkungan. Hingga akhirnya peneliti memutuskan untuk mengajak kerjasama komunitas *Green*

Generation Jakarta dalam penelitian ini. Komunitas *Green Generation* merupakan komunitas yang bergerak pada bidang lingkungan khususnya adalah sampah. Tujuan terbentuknya komunitas ini yaitu untuk menggerakkan masyarakat, khususnya generasi muda dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dari program yang terelisasi. Sebagai pertimbangan peneliti memilih *Green Generation*, dikarenakan domisili mereka dekat dengan lokasi penelitian. Kerjasama yang dilakukan peneliti dengan pihak *Green Generation* yaitu program kerja gabungan dengan pihak Komunitas Peduli Sampah Sunter dan Komunitas *Green Generation* Jakarta. Sehingga dalam program selanjutnya, komunitas *Green Generation* yang akan menjadi pemateri dan memberi pelatihan kepada Komunitas Peduli Sampah.

Kemudian terkait bahan utama daur ulang, Komunitas *Green Generation* menawarkan beberapa jenis sampah yang dapat diolah, antara lain plastik sedotan dan koran bekas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menjadikan koran bekas sebagai bahan utama dikarenakan prosesnya yang tidak memakan waktu banya dan efisien. Pada kesempatan tersebut diakhiri dengan membahas waktu dan teknis dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Sesuai kesepakatan bersama, program yang dilaksanakan, pada tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 15.30 bertempat di Sekretariat RW 06 Sunter Agung dan diikuti dengan kegiatan buka bersama. Pada kegiatan tersebut mengundang ibu-ibu kader PKK dengan pertimbangan, mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki semangat dalam kegiatan FGD dan juga anggota kelompok yang paling aktif dibandingkan bapak-bapak terkait daur ulang sampah. Serta untuk teknis program daur ulang,

para peserta diharapkan untuk membawa koran bekas masing-masing sebanyak dua *set* atau dua *bendel* untuk dijadikan bahan daur ulang berupa wadah serbaguna. Pada pelaksanaan program nantinya juga akan memperkenalkan Komunitas Peduli Sampah Sunter yang terbentuk.

Perencanaan program yang dibahas dalam dialog tersebut, merupakan tahapan *think* dalam siklus ketiga dari PAR. Kemudian dalam implementasi tahapan *act* pada siklus ketiga, dilaksanakannya program bersama oleh Komunitas Peduli Sampah Sunter dan Komunitas *Green Generation* dengan kegiatan edukasi persoalan sampah dan program daur ulang sampah rumah tangga. Adapun kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut

4.3.5 Pelaksanaan Program

Pada pelaksanaan program dilaksanakan hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 yang bertepatan pada bulan Ramadhan, sehingga kegiatan ini diadakan pada sore hari pukul 15.30 sampai dengan waktu berbuka puasa, bertempat di Kantor Sekretariat RW 06 Sunter Agung, dan dilanjutkan kegiatan berbuka bersama di tempat. Peserta hadir sebanyak 24 orang, yang tergabung dalam kelompok PKK RW 03 dan RW 06 Sunter Agung. Para peserta datang dengan membawa koran sebagai bahan daur ulang seperti yang sudah tertulis di undangan. Adapun jadwal kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program

Waktu	Acara	Keterangan
15.30-15.45	Pembukaan: Doa, Kata sambutan Mahasiswa Universitas Brawijaya	

15.45-16.15	Pemberian materi sampah dan sesi tanya jawab	Komunitas <i>Green Generation</i>
16.15-16.30	Pengenalan Komunitas Peduli Sampah Sunter	Fasilitator, Komunitas Peduli Sampah
16.30-16.40	Persiapan dan pembentukan kelompok untuk pembuatan daur ulang	Fasilitator, Komunitas <i>Green Generation</i>
16.40-17.45	Praktik daur ulang sampah	Komunitas <i>Green Generation</i>
17.45-selesai	Buka bersama	

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Kegiatan dipimpin oleh Billy sebagai moderator dengan dibuka berdoa bersama untuk kelancaran acara pada sore hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian edukasi oleh *Green Generation* sebagai pemateri. Pada kesempatan tersebut, komunitas *Green Generation* memberikan penjelasan mengenai pembedaan sampah dan pembuatan kompos. Setelah pemberian materi selesai, terdapat dialog antara peserta, pemateri dan Komunitas Peduli Sampah. Sehingga komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah, melainkan bersifat dua arah dan interaktif antara peserta dan pemateri.



Gambar 4.10 Berbagi Pengalaman Mengenai Pengolahan Sampah
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Usai sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan pengenalan Komunitas Peduli Sampah Sunter kepada peserta lainnya. Dalam kesempatan ini, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari terbentuknya Komunitas Peduli Sampah. Hadirnya Komunitas ini mendapatkan respon yang baik dari warga sekitar, sehingga untuk program selanjutnya, diyakini bahwa dengan hadirnya komunitas dapat dipercaya dan diandalkan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Acara selanjutnya yaitu pelaksanaan daur ulang sampah yang dibentuk dalam lima kelompok, pada satu kelompok terdiri dari lima orang, kemudian tiap satu kelompok didampingi oleh satu orang dari Komunitas *Green Generation*, supaya dalam kegiatan dapat berjalan secara kondusif. Selama kegiatan berjalan, para peserta menunjukkan wajah yang ceria dan bersemangat saat melakukan proses daur ulang. Para ibu-ibu dan pendamping saling berinteraksi mengenai cara pembuatan tersebut. Cara pengerjaan daur ulang yang terbilang mudah juga membuat ibu-ibu bersemangat dikarenakan mereka penasaran dengan hasil jadi dari koran bekas yang mereka buat sendiri. Sehingga dengan adanya kegiatan daur ulang sangat memberikan motivasi dan pengetahuan baru bagi ibu-ibu dalam mengolah sampah.



Gambar 4.11 Kegiatan Daur Ulang Koran Bekas
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Hingga pada akhirnya, karena keterbatasan waktu yang ada, dari kegiatan daur ulang koran bekas tersebut, masing-masing kelompok mendapatkan satu wadah serbaguna yang siap dipergunakan. Kegiatan yang dilaksanakan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dari masing-masing peserta, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam program ini berhasil menumbuhkan kesan yang baik.

4.4 Penerimaan Masyarakat terhadap Tindakan

Usai melaksanakan program, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perwakilan dari peserta yang datang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pesan dan kesan program yang telah dilaksanakan, selain itu juga untuk mendukung data peneliti. Berikut adalah masing-masing informan yang telah diwawancarai setelah program terlaksana

1. Ibu Agus

Ibu Agus merupakan ketua PKK RW.06 Sunter Agung. Ibu Agus mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, membuat masyarakat sekitar mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya, seperti cara mengolah dan pemilihan sampah, karena banyak orang yang belum tahu mana sampah organik dan non-organik. Ibu Agus meyakini dengan adanya kegiatan nyata dan terbentuknya komunitas dari tiap elemen perwakilan dari RW 03 dan RW 06 yang sudah mereka pernah jalankan menjadikan kedepannya program yang maju dan berkembang di lingkungan masyarakat RW 03 dan RW 06. Terlebih saat ini komunitas lebih terorganisir karena sudah di pantau oleh ketua FKDM secara langsung, sehingga kita

sebagai masyarakat di Sunter Agung ini bisa saling berbagi cerita mengenai pengelolaan sampah.

Dalam kegiatan yang peneliti lakukan membuat Ibu Agus dan warga sekitar merasa sangat senang, hal ini dinyatakan berdasarkan wawancara “Dengan adanya program ini membuat saya dan warga tahu bahwa ternyata koran bisa didaur ulang, sehingga saya dan ibu-ibu sekitar berkeinginan untuk melanjutkan program ini setelah lebaran.”

Secara keseluruhan, ibu Agus mengaku mendapatkan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya seperti sampah koran bisa didaur ulang menjadi wadah. Ibu Agus mengungkapkan perasaan senangnya dengan adanya program ini, dan berharap dengan adanya program yang sudah terlaksana dapat berjalan secara berkelanjutan dengan dipandu oleh komunitas yang sudah terbentuk.

2. Ibu Yayat

Ibu Yayat merupakan wakil dari kader PKK RW 03 Sunter Agung. Ibu Yayat mengaku lebih tertarik dengan adanya program nyata yang peneliti lakukan saat ini daripada acara FGD yang telah dilakukan sebelumnya dengan orang Dinas. Sebelumnya Ibu Yayat menceritakan pernah mengikuti program acara seperti ini, namun dia hanya datang seorang diri sebagai perwakilan RW 03 saja, berbeda pada program ini yang melibatkan langsung beberapa ibu-ibu dari RW 03. Dia juga mengatakan bahwa bukan hanya saya

saja yang senang dengan adanya program ini namun warga-warga sekitar juga sangat senang dengan adanya program ini.

Menurut Ibu Yayat adanya program daur ulang ini membuat pengetahuan terlebih ibu-ibu yang tidak memahami masalah sampah sebelumnya, sehingga dengan adanya program ini membuat mereka mengerti masalah-masalah sampah. Harapan Ibu Yayat, kegiatan daur ulang sampah juga dapat diterapkan oleh warga sekitar RW 03.

3. Pak Daniel

Pak Daniel merupakan wakil pengurus RW 06 Sunter Agung. Pak Daniel mengutarakan perasaannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti. Beliau sangat mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan program lanjutan dari kegiatan FGD sebelumnya, karena program ini berbeda dengan program sebelumnya yang dilaksanakan oleh pihak Dinas. Pak Daniel memiliki pandangan, bahwa selama ini pihak Dinas hanya sekedar datang tanpa ada tindakan lebih lanjut. Maka dengan adanya program yang telah dilaksanakan peneliti, Pak Daniel sangat bangga dan mengharapkan adanya partisipasi dari pihak karang taruna RW, karena menurut beliau karang taruna sangat berpotensi untuk melanjutkan program kedepannya. Selain itu, Pak Daniel juga akan mengusulkan program ini hingga ke tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

4. Pak Iwan

Pak Iwan merupakan ketua LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) RW 03 Sunter Agung. Pak Iwan memberikan kesan terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, dia mengatakan “bagus sekali ada kegiatan daur ulang yang melibatkan ibu-ibu PKK seperti ini”. Selain itu juga mengatakan bahwa program ini dapat membuat gerakan dan memberikan efek positif untuk warga sekitar yang belum tahu dengan permasalahan sampah.

5. Pak Kasiman

Pak Kasiman merupakan Ketua FKDM Sunter Agung, selain itu Pak Kasiman merupakan pihak yang berpengalaman dalam bidang persampahan, khususnya kompos. Beliau mengatakan sangat senang dengan adanya program yang peneliti buat, seperti masalah pembuatan kompos yang sudah dijelaskan. Beliau mengatakan “ibu-ibu merasa terlihat antusias, apalagi mengenai pembuatan kompos yang dijelaskan, walaupun ibu-ibu masih terlalu ngawang, tapi mereka sudah menunjukkan antusiasnya dengan bertanya”, tentu hal itu membuat ibu-ibu merasa ingin tahu dengan apa yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Pak Kasiman juga bercerita sebelum ada program ini, sebagai ketua FKDM juga pernah membuat acara seperti ini. Namun hanya beberapa rumah saja yang menerapkan untuk membuat kompos, dan hanya di awal saja semangat mereka untuk menerapkan hal tersebut. Hal ini membuat pak Kasiman mengatakan program yang dilakukan

oleh peneliti sangat bermanfaat untuk kedepannya, selain untuk mengurangi sampah, warga juga jadi semakin aktif. Serta warga juga mengetahui bagaimana cara mengolah sampah untuk dijadikan tempat yang berguna. Pak Kasiman berharap, dengan terlaksananya program, warga akan tergerak dalam kegiatan serupa.

Pada penelitian ini dilakukan selama enam bulan dimulai dari bulan Desember hingga bulan Juni 2018. Setelah melakukan rangkaian tindakan yang telah dilakukan, peneliti mewawancarai beberapa warga untuk melihat respon mereka sebagai tahap evaluasi tindakan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hasil tindakan dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari sebelum adanya tindakan, warga masih belum paham mengenai sampah dan perbedaannya. Setelah adanya tindakan, warga sudah mulai paham mengenai sampah dengan adanya edukasi dan daur ulang yang telah dilakukan, serta mereka berharap untuk diadakan program selanjutnya yang dibimbing oleh komunitas yang telah terbentuk.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Memposisikan Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Lingkungan): Perspektif Partisipatoris

Pada dasarnya pendekatan partisipatoris sangat penting bagi program pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho (2017) berjudul “Model Komunikasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Keberdayaan Masyarakat” yang membahas pemberdayaan masyarakat dalam upaya pembangunan oleh pemerintah didukung dengan *stakeholder*. Penelitian tersebut mengatakan bahwa pemerintah wajib melakukan turun lapang langsung (*top-down*) untuk memberdayakan masyarakat dengan mengangkat pendekatan partisipatif atau dialogis, di karenakan dengan adanya partisipatif akan memajukan pembangunan suatu daerah. Proses dialogis pada penelitian partisipatoris dalam pembangunan dirasa penting, karena akan terbangunnya hubungan antara pihak pemerintah dan kelompok masyarakat sehingga muncul aspirasi untuk program yang akan dilakukan.

Kemudian penelitian lain terkait komunikasi pembangunan dalam partisipatoris dilakukan oleh Amanah (2010) berjudul “Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir” yang membahas bahwa komunikasi pembangunan memiliki peran penting dalam masyarakat pesisir untuk menjembatani ketidakseimbangan kondisi yang ada dengan kondisi yang ingin dicapai dengan proses komunikasi partisipatif, dialogis, dan yang memotivasi. Pada kedua penelitian tersebut memperkuat, jika perspektif partisipatoris dalam

pembangunan masih cenderung berjalan dengan pendekatan *top-down* dan masih membutuhkan adanya wadah untuk dapat saling menghubungkan antara pihak pemerintah sebagai pembuat program pembangunan dengan masyarakat secara langsung. Sehingga dalam penelitian tersebut program pembangunan masih bergantung pada pemerintah. Sedangkan dalam pembangunan kini sudah mulai diterapkannya pendekatan *bottom-up* yang lebih mengarah pada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan. Menurut Sadjuri (2010), pendekatan *bottom-up* dirasa dapat menstimuli peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dikarenakan masyarakat lebih memahami latar belakang masalah yang mereka hadapi (Sadjuri, 2010).

Kemudian Tufte & Mefalopulos (dalam Nugroho, 2017) mengatakan bahwa, dalam merancang adanya pembangunan yang berasal dari masyarakat, dibutuhkan sebuah wadah sebagai tahap identifikasi permasalahan, menganalisis, mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi dan juga mengevaluasi dengan melakukan dialog. Sehingga dengan adanya dialog yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan masyarakat dapat membuat jalan keluar untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada. Dalam penelitian ini, dialog dijadikan sebagai wadah dalam menyatukan pikiran dari berbagai pihak yang memiliki perbedaan pandangan sebelumnya.

Adanya perbedaan pandangan pada penelitian ini yaitu mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan juga pandangan masyarakat mengenai permasalahan yang tak kunjung usai. Pihak pemerintah yang selama ini merasa telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah,

akan tetapi masyarakat belum merasakan perubahannya dan belum ada tindakan dari kinerja pemerintah. Sedangkan ditemukan bahwa munculnya permasalahan sampah juga berasal dari tingkah laku masyarakatnya sendiri dan sikap mereka yang masih bergantung pada fasilitas dari pemerintah. Hal tersebut juga menimbulkan ketimpangan antara kinerja pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dengan kecenderungan masyarakat yang mengandalkan pemerintah didasari dengan masih diterapkannya konsep modernisme, yaitu pendekatan yang memposisikan masyarakat hanya sebagai objek dalam pembangunan (Cangara, 2017). Konsep modernisme ini tidak menampilkan perhatian bagi kepercayaan diri masyarakat dalam keikutsertaan dan pengembangannya, karena komunikasinya yang bersifat satu arah (Nasution, 2009). Padahal dalam pembangunan, dibutuhkan strategi pemberdayaan dengan melihat masyarakat sebagai suatu subyek dan menggerakkan sumber daya manusia (Prasojo, 2004). Sehingga penelitian ini memunculkan adanya pendekatan yang bersifat *empowerment* yang mengupayakan adanya pemberdayaan di dalamnya, serta mementingkan partisipasi masyarakat untuk membuat perencanaan dan strategi dengan komunikasi dan menghasilkan sarana untuk mendorong adanya efektivitas dalam membuat suatu kebijakan (Oepen, dalam Wahyudin, 2017).

Menurut Hamijoyo (2005) dalam bukunya yang mengangkat komunikasi partisipatoris dalam pengembangan masyarakat, jika keikutserataan masyarakat tidak hanya dicapai dengan menggabungkan orang-orang, akan tetapi juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) pada program

yang dilaksanakan. Peneliti dalam melakukan pemberdayaan sebagai fasilitator, melibatkan penuh masyarakat dari mulai perencanaan, hingga pelaksanaan program. Berawal dari pengidentifikasian masalah, peneliti telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang perwakilan dari tiap elemen masyarakat RW 03 dan 06 dan kelompok masyarakat Kelurahan Sunter Agung yang bergerak bidang lingkungan. Setelah melakukan identifikasi masalah, dilakukan dialog dalam mendudukan pihak pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan hingga merencanakan program yang dilakukan. Dalam hal ini, masyarakat juga berperan aktif mengenai pengambilan keputusan untuk program kedepannya. Penelitian ini, sejalan dengan Amanah (2010) mengenai komunikasi pembangunan, bahwa dalam peneliti yang bertindak sebagai fasilitator dan *expert* memiliki tugas dalam menjembatani masyarakat dengan pemangku kepentingan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang lebih baik.

Pada keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan meskipun penerapan partisipasi dapat menjamin suatu keberhasilan suatu program, penerapan partisipasi pada dasarnya lebih efisien diterapkan pada program yang berkelanjutan. Selanjutnya, partisipasi juga memiliki tujuan-tujuan, bahkan aturan yang mungkin tidak realistis karena penentuan dan penerapan dari norma serta tujuan memiliki proses jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini yang menjadi beban tuntutan partisipan dalam prosesnya. Sehingga kaitannya dengan penelitian ini, dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam

bidang lingkungan, di karenakan hal tersebut yang menjadi tolok ukur keberhasilan program selanjutnya melalui komunitas yang telah terbentuk.

5.2 Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Sampah Melalui Komunikasi Partisipatoris

Pada pengembangan masyarakat, komunikasi partisipatoris berfungsi untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya. Berangkat dari hasil yang telah ditemukan, bahwa kelompok masyarakat Sunter Agung yang sebelumnya sudah terbentuk masih kurang terlihat keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya sikap tersebut membuat permasalahan sampah muncul. Penerapan komunikasi partisipatoris dalam upaya membangun kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, seperti yang dikatakan oleh Prasojo (2004) dengan penelitiannya yang berjudul “*People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*” bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam rangka kegiatan pembangunan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan tindakan partisipasi dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah Sunter Agung.

Partisipasi masyarakat pertama yang dilakukan dalam upaya pengumpulan data yaitu dengan kegiatan *Focus group discussion* (FGD), pelaksanaan kegiatan FGD bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan sampah yang ada di sekitar Sunter Agung khususnya RW 03 dan RW 06. Para peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu perwakilan dari tiap elemen masyarakat RW 03 dan RW

06, kelompok masyarakat Kelurahan Sunter Agung yang bergerak pada bidang lingkungan, perwakilan pihak Kelurahan, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta. Partisipasi dalam kegiatan ini juga ingin melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerjasama dengan perencanaan pembangunan kedepannya. Karena menurut Kogoya *et al* (2015) menilai bahwa ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dari besarnya peran dan wewenang masyarakat dalam menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang tersedia bagi masyarakatnya. Komunikasi yang berjalan pada saat kegiatan bersifat dua arah antara narasumber dan para peserta yang hadir dalam kegiatan. Dalam tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969) kegiatan FGD ini masih berada pada level partisipasi simbolik, yang di dalamnya terdapat pemberian informasi, konsultasi dan konsesi pada masyarakat, sehingga masyarakat di sini masih perlu meningkatkan kemampuannya dan mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya agar mereka dapat merasakan perubahan sosial.

Kemudian partisipasi masyarakat kedua yaitu dalam kegiatan pembentukan Komunitas Peduli Sampah Sunter. Pembuatan komunitas ini dikarenakan perlunya persamaan pandangan dari berbagai pihak terkait dan memiliki bertujuan sebagai penggerak masyarakat dalam program yang selanjutnya. Pada pembentukan Komunitas, sejalan dengan yang dikatakan oleh Green (dalam Cockburn dan Trentham, 2002) bahwa masyarakat memiliki pengalaman dan pemahaman untuk mewujudkan adanya perubahan sosial. Dengan terbentuknya komunitas, mereka yang berpengalaman dalam bidangnya dapat saling bertukar informasi dan dapat memecahkan permasalahan secara bersama-sama dalam

kegiatan pengelolaan sampah. Selebihnya, mengenai pembentukan komunitas, dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedua yang memiliki fokus terhadap manajemen koordinasi makna.

Selanjutnya, setelah melakukan pengidentifikasian masalah dan juga pembentukan komunitas, kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan program pengolahan sampah yang dilakukan oleh peneliti selaku fasilitator yang mewadahi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Program yang dilaksanakan mengundang kelompok masyarakat dari kader ibu-ibu PKK RW 03 dan RW 06, ketua LMK dari masing-masing RW, dan Ketua FKDM Kelurahan Sunter Agung. Pelaksanaan program mencakup kegiatan edukasi dan juga daur ulang sampah terbuat dari koran, dengan menggandeng komunitas *Green Generation* Jakarta sebagai pemateri dan pendamping peserta. Dalam pelaksanaan program pengolahan sampah bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan yaitu pada partisipasi langsung pada kegiatan bersama, partisipasi dalam bentuk barang yang berupa koran untuk dijadikan bahan utama daur ulang, partisipasi bentuk dukungan kepada program yang dilaksanakan, dan bentuk partisipasi representif dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Komunitas Peduli Sampah Sunter yang di dalamnya terdapat perwakilan dari tiap RW 03 dan RW 06 Sunter Agung untuk merencanakan dan melaksanakan program selanjutnya. Pelaksanaan program ini jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi Arnstein (1969) berada pada tingkat partisipasi simbolik, yang mencakup keseluruhan tahap dan juga tingkat partisipasi penuh yang sampai pada tingkat pemberian wewenang terhadap program yang dilakukan.

Setelah melakukan berbagai rangkaian kegiatan dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di wilayah RW 03 dan RW 06 Sunter Agung, masyarakat merasa senang dan bangga dengan adanya kegiatan tersebut. Melalui hasil wawancara pasca program, pelaksanaan program telah membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, antara lain dengan memberikan pengetahuan baru terkait sampah, mengajarkan proses pembuatan kompos, mengajarkan cara pengolahan sampah yang tepat, sekaligus menjadikan masyarakat yang mandiri dengan tidak lagi mengandalkan pada kinerja pemerintah. Selain itu, pelaksanaan program tidak hanya berhenti ketika kegiatan berakhir, akan tetapi dengan adanya Komunitas Peduli Sampah Sunter yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berpengalaman dan bergerak pada bidang lingkungan, menjadikan program tersebut akan berjalan secara berkelanjutan.

Program berkelanjutan dalam hal ini jika dikaitkan dengan konteks SDG's yaitu untuk memperbaiki kualitas hidup yang dapat disesuaikan dengan adanya daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Keberlanjutan juga diartikan dengan melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi sumber daya yang ada. Terdapat dua dimensi dalam konsep keberlanjutan menurut Heal (dalam Nugroho, 2010). Pertama yaitu dimensi waktu, bahwa keberlanjutan ada keterkaitannya dengan masa yang akan datang. Kemudian kedua, dimensi interaksi antara sumber daya dan lingkungan. Penerapan pada penelitian ini, pada dimensi waktu diharapkan nantinya Komunitas Peduli Sampah dapat merancang program secara terjadwal untuk mengadakan program kedepannya, kemudian pada dimensi interaksi, Komunitas terus melakukan inovasi dan kreasi terhadap program yang dilakukan

dengan melibatkan masyarakat lain untuk mencari ide dan gagasan dalam hal pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai.

Secara keseluruhan, program yang telah dilaksanakan membawa pengaruh positif bagi masyarakat sekitar. Jika ditinjau dari komunikasi partisipatoris, tindakan partisipasi dalam implementasi program telah mencakup pada dua perspektif, yang pertama yaitu melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga keseluruhan, kedua dengan adanya *feedback* masyarakat secara langsung (Mikkelsen, 2011). Penelitian ini merupakan jenis partisipasi murni dengan melihat adanya keikutsertaan masyarakat mulai dari pemikiran solusi permasalahan sampai dengan evaluasi program seperti yang dikatakan oleh Hamijoyo (2005) jika partisipatoris murni melihat pada kekompakan dari masyarakat dari tahap perancangan hingga pelaksanaan program. Pada tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969) dalam “Delapan Tangga Partisipasi Publik”, sebelum adanya penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah belum ada, atau dapat dikatakan bahwa tidak adanya tindak partisipasi. Seiring dengan kegiatan yang terus berjalan, masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi dan terjadi peningkatan, dari yang sebelumnya tidak ada tindak partisipasi, kini masyarakat berada pada tingkat partisipasi penuh.

Kemudian untuk menilai partisipasi masyarakat, Sulaiman (dalam Nandana, 2016) menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang menjadikan konsep untuk mempengaruhi keikutsertaan masyarakat. Pada program yang telah dilaksanakan, peneliti melihat adanya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk keikutsertaan atau kehadiran

Bentuk dalam partisipasi ini dilihat dari kehadiran masyarakat untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh peneliti dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat selama ini cukup antusias terhadap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mereka selalu hadir dalam setiap rangkaian kegiatan, terkecuali yang sedang berhalangan hadir.

2. Partisipasi bentuk ide

Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk ide, dilihat dari masyarakat menyatakan pendapat dan memberikan kritik saran pada tiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Partisipasi bentuk barang atau harta

Partisipasi ini dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam program pengolahan daur ulang sampah. Pada kegiatan tersebut para peserta diharapkan untuk membawa koran bekas pakai untuk dijadikan bahan utama dalam daur ulang.

4. Partisipasi dengan bentuk tenaga

Dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, dilihat dari kemauan warga untuk hadir ke lokasi kegiatan dengan jarak tempuh yang dapat dikatakan tidak begitu dekat, khususnya warga yang berasal dari RW 03 untuk datang ke tempat kegiatan yang biasa diadakan di sekretariat RW 06.

5. Partisipasi berbentuk ketrampilan

Jika dilihat dari bentuk ketrampilan, masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengolahan daur ulang menggunakan koran, mereka butuh adanya ketrampilan dalam mengolah koran tersebut agar menjadi barang yang bermanfaat.

6. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan

Pada tahap pengambilan keputusan, penelitian melibatkan penuh masyarakat dari tahap perencanaan dimulai dari FGD hingga rencana kegiatan pengelolaan sampah.

7. Partisipasi bentuk representif

Partisipasi dalam bentuk wewenang ini dilampahkan kepada Komunitas Peduli Sampah Sunter terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannya terkait pengelolaan sampah dengan dipantau langsung oleh Ketua FKDM di dalam komunitas tersebut.

8. Partisipasi bentuk sosial

Dalam bentuk partisipasi sosial, melihat pada keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka.

Dalam memperjelas analisis peneliti, maka penelitian ini menggabungkan dan menuangkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ketika melakukan kegiatan program dalam upaya mengurangi permasalahan sampah. Pengelompokan kedalam bentuk partisipasi ini ingin melihat sejauh mana partisipasi masyarakat

dalam rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Hingga dalam satu kegiatan dapat terjadi bentuk partisipasi secara bersamaan.

Penelitian yang melibatkan penuh masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program, tentunya di dalamnya terdapat batasan terkait ukuran perubahan tingkah laku masyarakat dalam program yang telah dilakukan. Menurut Sagala (2010) terdapat tiga aspek yang mempengaruhi dalam penerimaan pembelajaran, antara lain aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Setelah melakukan berbagai rangkaian kegiatan, peneliti melihat bahwa terdapat aspek tersebut dalam penerimaan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah, antara lain:

1. Aspek kognitif: masyarakat diberikan pemahaman mengenai sampah dari mulai jenisnya, cara memilahnya, dan pengelolaannya. Selain itu masyarakat juga saling berbagi pengalaman mengenai pengolahan sampah, sehingga terjadi pertukaran satu sama lain, sehingga pengetahuan baru yang didapatkan, bisa membawa pengaruh bagi mereka.
2. Aspek afektif: masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan mampu menerima dan menghargai pendapat orang lain, apa yang telah menjadi keputusan bersama, masyarakat percaya bahwa pelaksanaan program akan berjalan kedepannya.
3. Aspek psikomotorik: pada aspek ini, peneliti belum melihat perubahan yang terjadi di masyarakat, karena pada aspek ini melihat melalui kepribadian tingkah laku seseorang. Mungkin kedepannya, peneliti lain

dapat mengangkat penelitian serupa dengan melihat aspek psikomotorik perubahan pada masyarakat.

5.3 Batasan Penelitian pada *Participatory Action Research* (PAR)

Berdasarkan hasil temuan melalui pemberdayaan masyarakat dalam *Participatory Action Research* (PAR) pada kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari tahap pengidentifikasian masalah dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dialog dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program, serta pelaksanaan program, maka partisipasi masyarakat mengalami peningkatan (Yadav dalam Mardikanto, 2015). Menurut hasil yang telah didapatkan, sebelum adanya tindakan yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat sekitar masih kurang dan kesadaran masyarakat pun masih rendah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, melalui rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, masyarakat mulai tergerak untuk ikut serta dalam program pembangunan berkaitan persoalan sampah.

Pada penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai *Participation Action Research* (PAR) dilakukan oleh Rijadi (2010) berjudul “Upaya-Upaya Tindak Lanjut Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas” dalam tahapan partisipasi ia menggunakan teori pada Stringer (1999) yang dimulai dari tahapan *look*, *think*, sampai *act*. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan tahapan yang sama untuk melihat sampai batas mana peneliti melakukan riset partisipasi tindakan yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memiliki satu siklus dari tahapan PAR, pada penelitian ini memiliki tiga siklus. Pada siklus yang pertama dimulai dari tahapan *look*, peneliti menghimpun

data dengan mengumpulkan berita terkait persoalan sampah di Sunter, melakukan observasi langsung ke wilayah Sunter Agung, dan wawancara langsung dengan pihak Kelurahan dan pengurus RW setempat. Berangkat dari hasil yang ditemukan dari data awal, peneliti masuk pada tahapan *think* untuk melakukan identifikasi dalam hasil permasalahan yang ada. Melalui wawancara dengan pihak Kelurahan dan warga setempat, ditemukan bahwa permasalahan sampah muncul karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakannya pemberian edukasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai narasumber dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan warga sekitar. Pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada tahapan *act* dalam siklus yang pertama.

Kemudian siklus kedua, pada tahapan *look* melihat dari kegiatan FGD yang dilakukan. Peneliti melihat terdapat perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan masyarakat mengenai persoalan sampah, serta peneliti juga mendapatkan adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah yang ada di sekitar wilayah mereka. Selain itu dari hasil yang ditemukan, terdapat potensi kelompok sadar yang dapat diberdayakan. Pada tahapan *think* di siklus kedua, peneliti mengintepretasikannya dengan memfasilitasi kelompok-kelompok sadar untuk menuangkan pemikiran mereka pada sebuah dialog untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam membuat suatu program. Selanjutnya dari *think* tersebut, dibentuknya Komunitas Peduli Sampah yang di dalamnya terdiri dari tiap elemen kelompok masyarakat, dalam kegiatan ini merupakan tahapan *act* siklus kedua pada PAR yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan dialog yang telah dilakukan dari siklus kedua, peneliti melanjutkannya siklus ketiga dalam tahapan PAR dengan melihat (*look*) bahwa masyarakat dalam komunitas tersebut sudah mulai timbul kesadaran dan membutuhkan stimuli untuk segera melakukan kegiatan. Kemudian pada tahapan *think* di siklus ketiga ini merupakan kegiatan perencanaan program yang dilaksanakan Komunitas Peduli Sampah. Pada akhirnya program yang direncanakan merupakan kegiatan edukasi mengenai persoalan sampah dan program daur ulang sampah rumah tangga. Implementasi tahapan *act* pada siklus ketiga, dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Sampah Sunter dengan Komunitas *Green Generation*. Seusai kegiatan yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara untuk melihat respon warga terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan, maka penelitian ini masih berada pada tahap kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan edukasi dan pengelolaan daur ulang sampah. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan warga yang mengikuti kegiatan tersebut. Lalu, untuk melihat keberlanjutan program yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Sampah Sunter masih tetap di pantau dengan adanya *group whatsapp* yang telah dibuat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Komunikasi Partisipatoris dalam program pengelolaan sampah berbasis komunitas (*Participatory Action Research* dalam Penyelesaian Persoalan Sampah pada Masyarakat di Lingkungan RW 03 dan RW 06 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara) dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam program pengelolaan sampah berhasil, walaupun ada beberapa hal yang belum tercapai karena permasalahan yang ada selain dari hal teknis, muncul dari individu di masyarakat sendiri. Hal ini terbukti dari beberapa temuan peneliti dalam hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti dalam upaya membangun partisipasi dan menyadarkan masyarakat mengenai persoalan sampah telah melakukan berbagai kegiatan mulai dari *Focus Group Discussion* (FGD), dialog, serta edukasi dan daur ulang sampah rumah tangga. Sebelum adanya kegiatan yang bersifat partisipasi ini, masyarakat tergolong masih sangat bergantung dengan kinerja pemerintah dan sebagian masyarakat merasa bahwa permasalahan timbul dari warga sekitar yang kurang peduli dengan sampah. Kemudian setelah melakukan rangkaian kegiatan sebagai *action research*, masyarakat sudah mulai paham dan sadar akan pentingnya permasalahan dan pengelolaan sampah. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara terhadap warga yang

mendukung adanya program pengelolaan sampah untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Pada partisipasi yang telah dilakukan masyarakat, penelitian ini masuk pada jenis partisipasi murni, karena masyarakat terlibat penuh dari awal perencanaan hingga pada tahap evaluasi program. Pada level partisipasi, penelitian ini masih sudah pada tahap partisipasi penuh, dari yang sebelumnya tidak ada tindak partisipasi dari masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, program yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan edukasi dan daur ulang pengolahan sampah membuahkan dampak positif bagi masyarakat, hal tersebut dinyatakan dari hasil wawancara warga yang mengapresiasi program yang telah dilaksanakan.

6.2 Saran

Peneliti memiliki saran akademis dan praktis serta rekomendasi terhadap peneliti selanjutnya yang mengangkat penelitian sejenis dalam ranah komunikasi, khususnya komunikasi lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat.

6.2.1 Saran Teoretis

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan teori komunikasi lingkungan di Indonesia dengan menggunakan tindak partisipasi masyarakat secara lebih lanjut.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian *Participatory Action Research* (PAR) dengan membuat program yang lebih kreatif dan inovatif.

6.2.2 Saran Praktis

1. Dengan adanya Komunitas Peduli Sampah Sunter, diharapkan kedepannya program pengolahan sampah akan terus berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pelatihan pengelolaan sampah perlu rutin diagendakan, karena hal tersebut akan membuat gerakan Ibu-ibu PKK lebih aktif dan kreatif.

6.3 Limitasi Penelitian

Terdapat limitasi pada penelitian yang mempengaruhi keterbatasan data yang dihasilkan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian tindakan yang telah dilakukan hanya sampai tahap 'act' dengan dilaksanakan kegiatan edukasi dan daur ulang sampah rumah tangga. Meskipun baru pada tahap tersebut, penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain untuk mencapai tujuan yang *sustainability*.
2. Penelitian ini lebih berfokus dengan sudut pandang masyarakat, tanpa melihat dari segi pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. (2001). *Participatory research appraisal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Afandi, A. dkk. (2016). *Modul participatory action research (PAR) untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Alrakhman, D. (2013). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan di Kecamatan Cipayung Kota Depok*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia.
- Ariestya, A. (18 September 2017). *Mempertanyakan eksistensi komunikasi lingkungan di Indonesia*. Diakses pada 23 April 2018, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/08220681/mempertanyakan-eksistensi-komunikasi-lingkungan-di-indonesia>.
- Astriani, B. (2009). *Sampah organik dan anorganik*. Bogor Journal, 2(1):77-84.
- Astuti, W & Hardiana, A. (2009). *Perencanaan partisipatif pada level kelurahan sebagai upaya pengentasan kemiskinan Pada permukiman kumuh perkotaan*. Jurnal. Surakarta: Universitas Negeri Solo.
- Awza, R & Yazid, T. (2016). *Pola komunikasi kelompok "Duta Lingkungan" pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru*. Jurnal. Riau: Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistik. (27 Februari 2016). *Jakarta in figure*. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.bps.go.id/>
- Betit, B. (2004). *Participatory action planning: Integrating aspects of action research, organization development, and strategic planning*. United States: UMI. Proquest.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi komunikasi, teori, paradigma dan diskursus teknologi di masyarakat*. Jakarta: Media Group. h. 91.
- Cahyandito, F. (2005). *Pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan ekologi, sustainability communication dan sustainability reporting*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Cangara, H. (2017, November 8). *Isu-Isu Kontemporer Dalam Komunikasi Pembangunan*. Kuliah Tamu. Malang: Universitas Brawijaya

- Claridge, T. (2004). *Designing social capital sensitive participation methodologies*. Dunedin: Social Capital Research.
- Cockburn, L & Trentham, B. (2002). *Participatory action research: Integrating community occupational therapy practice and research*. The Canadian Journal of Occupational Therapy. ProQuest
- Colle, dkk. (1993). *Book reviews: Asian journal of communication*. London: Routledge.
- Dahlan, M. (1986). *Environmental communication : Communicating the dilemma of development*. Singapore: Asian Mass Communication Research & Information Centre.
- Dahlan. M.A. (1989). *The environmental approach to mass media coverage*. In *Media Asia*. Vol. 16, No. 4, pp. 219-222. Singapore: Asian Mass Communication Research & Information Centre.
- Dilla, S. (2007). *Komunikasi pembangunan pendekatan terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. (3 Juni 2011). *Masterplan dan kajian akademis persampahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032*. Jakarta (ID): PT. Arkoning Engineering MP. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.lingkunganhidup.jakarta.go.id/>
- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. (23 Agustus 2011). *Studi komposisi dan karakteristik sampah di DKI Jakarta*. Jakarta (ID): Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.lingkunganhidup.jakarta.go.id/>
- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. (11 November 2014). *Paparan pola penanganan sampah*. Jakarta (ID): Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.lingkunganhidup.jakarta.go.id/>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (29 Desember 2016). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.lingkunganhidup.jakarta.go.id/>
- Faizal. (2015). *Diskursus pemberdayaan masyarakat*. Jurnal. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan. Ijtimaiyya. Vol. 8, No. 1.
- Fauzi, A & Oxtavianus, A. (2014). *The measurement of sustainable development in Indonesia*. Jurnal. Bogor: Institut Teknologi Bogor.

- Fitriyani. (27 Desember 2017). *Jakarta hasilkan 2,2 juta ton sampah sepanjang 2017*. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <https://news.okezone.com/read/2017/12/27/338/1836525/jakarta-hasilkan-2-2-juta-ton-sampah-sepanjang-2017>
- Griggs, D, et al. (2014). *An integrated framework for sustainable development goals*. Stockholm: Resilience Alliance.
- Hadiyanto. (2009). *Desain pendekatan komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan peternak domba rakyat*. Jurnal Media Peternakan, Vol. 32, No. 2, pp. 145-154
- Hamad, I. (2005). *Strategi komunikasi untuk menyukseskan program investasi sosial*. Jakarta: Suspensos.
- Hamijoyo, S. (2005). *Komunikasi partisipatoris: Pemikiran dan implementasi komunikasi dalam pengembangan masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hardjasoemantri, K. (1986). *Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harun, R & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Pespektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hermawan, F. (21 April 2017). *Penerapan teknologi Waste To Energy (WTE) pada rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter Jakarta Utara*. Unit Pengelolaan Sampah Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <https://upst.dlh.jakarta.go.id/article/post-8>
- Herutomo, C. (2013). *Komunikasi lingkungan dalam mengembangkan hutan berkelanjutan*. Purwokerto: Acta Diurna. FISIP Universitas Jendral Soedirman.
- Hidayah, R. (2013). *Pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa Wisata Pentingsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indardi. (2016). *Komunikasi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Iqbal. (19 Oktober 2017). *Wagub Sandi: Masalah banjir di Jakarta didominasi sampah!*. Diakses pada 29 Februari 2018, dari

<https://news.okezone.com/read/2017/10/19/338/1798515/wagub-sandi-masalah-banjir-di-jakarta-didominasi-sampah>

- Ishartono, R & Santoso T. (2016). *Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan*. Bandung: Social Work Jurnal.
- Jati, T. (2013). *Peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan (Studi kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)*. Jurnal. Semarang: Laredem.
- Juliansah, M. (2010). *Analisis keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi*. Tesis. Depok: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. hal:34.
- Kamaruddin. (2014). *Modul komunikasi sosial dan pembangunan*. Aceh: Universitas Malikussaleh.
- Kogoya, dkk. (2015). *Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Kusumadewi, A. (9 Februari 2015). *Banjir Jakarta: Dulu lima tahunan kini tiap tahun, kenapa?*. Diakses pada 21 April 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150209155301-20-30732/banjir-jakarta-dulu-lima-tahunan-kini-tiap-tahun-kenapa>
- Lindawati. (2013). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan motoric anak usia prasekolah*. Jakarta: Poltekkes jakarta.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Maulana, A. (23 Desember 2016). *Herlina Agustin, "Komunikasi lingkungan berperan menyadarkan khalayak menjaga lingkungan"*. Diakses pada 21 April 2018, dari <http://www.unpad.ac.id/profil/dr-herlina-agustin-s-sos-m-t-komunikasi-lingkungan-berperan-menyadarkan-khalayak-menjaga-lingkungan/>
- Mefalopulos, P. (2003). *Theory and practice of participatory communication: The case of the FAO Project "Communication for development in Southern Africa"*. Disertation. Texas at Austin: Presented to the Faculty of the Graduate School, The University of Texas at Austin.
- Mhagama, Peter. (2016). *The importance of participation in development through community radio: a case study of Nkhotakota community radio station in Malawi*. Melbourne: Routledge.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Miller, G., Tyler, S., Scott E. (2016). *Environmental science: Solid and hazardous waste- fifteenth edition*. Pacific Grove: CA Cengage Learning National Geographic Learning.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nandana, G. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan lingkungan (Studi tentang bank sampah "Kasih" dan bank sampah "Gemah Ripah" di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Narimawati, dkk. (2010). *Penulisan karya ilmiah: Panduan awal menyusun skripsi dan tugas akhir aplikasi pada fakultas ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Penerbit Genesis.
- Nasution, S. (2006). *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Z. (2009). *Komunikasi pembangunan pengenalan teori dan penerapannya*, edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nasor, M. (2013). *Teknik komunikasi dalam perubahan sosial*. Ijtimaiyya, Vol. 6, No.1. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan.
- Neuman, W. (2017). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nufus, Z. (2015). *Lokasi optimal intermediate treatment facilities dan implementasinya di DKI Jakarta*. Skripsi. Bogor: Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.
- Patterson, S.J. & Radtke, J.M. (2009). *Strategic Communications for Nonprofit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful Plan*. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Prabowo, K. (30 Maret 2018). *Sampah ikut "mewarnai" Sunter Agung* . Diakses pada 11 April 2018, dari <http://news.metrotvnews.com/metro/VNx7VOyK-sampah-ikut-mewarnai-sunter-agung>
- Prasojo, E. (2003). *People and society empowerment: Perspektif membangun partisipasi publik*. Depok: Research Centre FISIP UI.
- Putri, S. (2013). *Analisis penerapan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Depok (Studi kasus di Kecamatan Sukmajaya)*. Depok: FISIP UI.

- Rahadian, A. (2016). *Strategi pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Ramah, M. (2009). *Komunikasi pembangunan dalam perspektif terkini*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako. Vol. 1 No.2.
- Rijadi, A. (2010). *Upaya-upaya tindak lanjut kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Rogers, E. (1989). *Komunikasi dan pembangunan: perspektif kritis, terjemahan Dasmar Nurdin*. Jakarta: LP3ES
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of innovation, 5th edition*. New York: Free Press
- Sadjuri, K. (2010). *Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berbasis partisipasi*. Jurnal. Malang: Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang dan Staf Pengajar Pada Balai Besar Kemendagri PMD. Muwazah, Vol. 2, No. 2.
- Sagala, S. (2010). *Supervisi pembelajaran dalam profesi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Servaes, J. (1996). *Participatory communication research with new social movements: A realistic utopia*. New Delhi: Sage Publications
- Servaes, J. (1999). *Communication for development: One world, multiple cultures*. Cresskill, NJ: Hampton Press
- Servaes, J. (2002). *Communication for development approach of some governmental and non-governmental agencies*. London: Sage Publications
- Simanjuntak, T. (29 Januari 2017). *Sampah di Pedestrian Jl RE Martadinata dikeluhkan warga*. Diakses pada 30 Maret 2018, dari <http://www.beritajakarta.id/read/41096/sampah-di-pedestrian-jl-re-martadinata-dikeluhkan-warga#.Wqt468NubIU>
- Stringer, E. (1996). *Action research: A handbook for practitioners*. London: Sage Publications, Inc
- Sudrajat. (2006). *Mengelola sampah kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryaningtyas, A. (2012). *Strategi komunikasi partisipasif pada awal program pembangunan (Studi kasus pendekatan pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat dalam program pembangunan underpass di Makamhaji)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Tahoba, A. (2011). *Strategi komunikasi dalam program pengembangan masyarakat (community development): Kasus program community development pada komunitas adat terkena dampak langsung proyek LNG Tangguh di sekitar Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Papua: Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian, Universitas Papua.
- Tambun, L. (6 Februari 2018). *Sampah masih jadi penyebab utama banjir di Jakarta*. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <http://www.beritasatu.com/jakarta/477082-sampah-masih-jadi-penyebab-utama-banjir-di-jakarta.html>
- Tirto, (15 Februari 2018,). *Kondisi banjir Sunter Jakarta Utara pada 15 Februari 2018*. Diakses pada 27 Februari 2018, dari <https://tirto.id/kondisi-banjir-sunter-jakarta-utara-pada-15-februari-2018-cEQ2>
- Ulya, A. (26 Februari 2018). *Waspada bahaya limbah sampah elektronik bagi kesehatan!*. Diakses pada 21 April 2018, dari <https://linisehat.com/waspada-bahaya-limbah-sampah-elektronik-bagi-kesehatan-sekitar-kita/>
- Wahyudin, U. (2017). *Strategi komunikasi lingkungan dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan*. Bandung: Jurnal Common.
- West, R & Lynn, H. (2008). *Teori komunikasi : Analisis dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjajani, dkk. (2009). *Penggunaan soft sysfem methodology dan grounded theory dalam membangun teori pada penelitian proses strategi (Strategy process Research)*. Jurnal Manajemen. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Yassin. R. (27 Maret 2018,). *Jakarta darurat sampah*. Diakses pada 23 April 2018, dari <https://news.detik.com/kolom/d-3939006/jakarta-darurat-sampah>
- Yaumi, M. & Damopolii, M. (2014). *Action research: teori, model, dan aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

